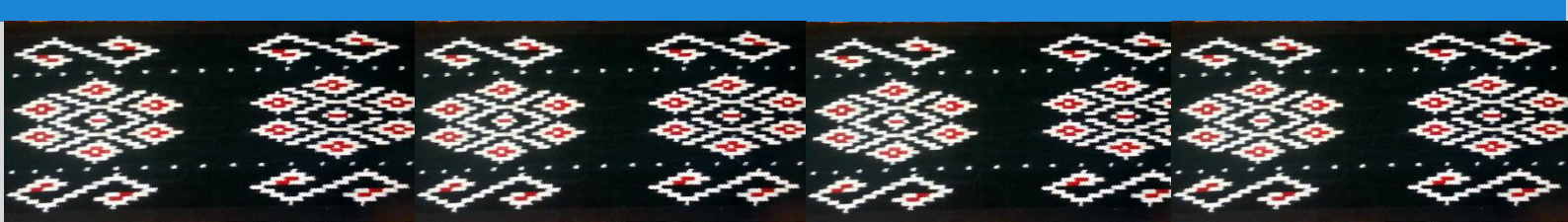




**LAPORAN PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2022**




KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati, Tanggal 8 Juli Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK).

Laporan ini menjelaskan tentang strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao yang mencakup tiga hal yaitu: *Pertama*, kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang membahas koordinasi kelembagaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. *Kedua*, capaian analisis yang membahas tentang program unggulan. *Ketiga*, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan rencana tindak lanjut program penanggulangan kemiskinan.

Terlaksananya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang direncanakan tidak terlepas dari peran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Rote Ndao oleh karena itu koordinator TKPK Kabupaten Rote Ndao menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang terlibat pada kegiatan kemiskinan ini. Laporan ini menjadi salah satu tolok ukur dalam evaluasi pencapaian kinerja kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada masa yang akan datang.

Ba'a, Desember 2022
Plt. Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao



Jermi M. Haning
Jermi M. Haning, Ph.D
NIP. 19730615 199302 01 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen	6
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	8
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	8
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	8
2.1.2. Kondisi Demografi	11
2.2. Gambaran Kondisi Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao	15
2.2.1. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao	15
2.2.2. Ketenagakerjaan	18
2.2.3. Sosial	21
2.2.4. Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana	22
2.3. Dimensi Pendidikan	26
2.4. Dimensi Bidang Kesehatan	35
BAB III KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	52
3.1. Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Daerah	52
3.2. Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Provinsi dan Pusat	56
3.3. Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018-2022	56
3.3.1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	61
3.3.2. Dinas Kesehatan	64
3.3.3. Dinas Sosial	67
3.3.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69
3.3.5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	72
3.3.6. Dinas Pertanian	74
3.3.7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	75
3.3.8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76
3.3.9. Dinas Peternakan	77
3.3.10. Dinas Kelautan dan Perikanan	78

	3.3.11	Dinas Ketahanan Pangan	79
	3.3.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81
	3.3.13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	82
	3.3.14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	83
	3.4.	Pengendalian dan Evaluasi	84
BAB IV		CAPAIAN DAN ANALISIS	89
	4.1.	Program Unggulan Penanggulangan Kemiskinan	89
	4.2.	Capaian Kinerja Penanggulangan Kemiskinan	99
BAB V		RENCANA TINDAK LANJUT	112
	5.1.	Permasalahan Dalam Pembangunan	112
	5.1.1	Permasalahan Pembangunan Kependudukan	112
	5.1.2	Permasalahan Pembangunan Ketenagakerjaan	112
	5.1.3	Permasalahan Pembangunan Pendidikan	113
	5.1.4	Permasalahan Pembangunan Kesehatan	114
	5.1.5	Permasalahan Pembangunan Ekonomi (Usaha Kecil dan Menengah)	115
	5.1.6	Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Warga Miskin	115
	5.2.	Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah	116
BAB VI		PENUTUP	120
	6.1.	Kesimpulan	120
	6.2.	Rekomendasi	121

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah menurut Kecamatan Tahun 2022	8
Tabel 2.2	Luas Daerah Menurut Pulau Yang di huni	11
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021	12
Tabel 2.4	Perkembangan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2017-2021	13
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010-2021	13
Tabel 2.6	Distribusi Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017 - 2021	14
Tabel 2.7	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021	20
Tabel 2.8	Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	21
Tabel 2.9	Layanan Administrasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	23
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	24
Tabel 2.11	Kualitas Layanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2017-2021	25
Tabel 2.12	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kab. Rote Ndao, NTT dan Nasional Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.13	Kualitas Pelayanan Urusan Pendidikan	33
Tabel 2.14	Kualitas Pelayanan Urusan Kesehatan Tahun 2017 - 2021	37
Tabel 2.15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	39
Tabel 3.1	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2022	58
Tabel 3.2	Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021	73
Tabel 3.3	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kinerja dan Anggaran OPD	87
Tabel 4.1	Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	90
Tabel 5.1	Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah	116

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao	9
Gambar 2.2	Data Perkembangan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	14
Gambar 2.3	Data Perkembangan Penduduk Kab Rote Ndao 2017-2022	16
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional Tahun 2018-2022	16
Gambar 2.5	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao (P2) Tahun 2017-2022	17
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	19
Gambar 2.7	Presentase Penduduk Yang Bekerja Pada Lapangan Usaha Tahun 2020-2021	19
Gambar 2.8	Perkembangan Penduduk Yang Bekerja Tahun 2017-2021	20
Gambar 2.9	Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021	28
Gambar 2.10	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021	30
Gambar 2.11	Jenis Penyakit Terbesar di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021	41
Gambar 2.12	Trend BBLR di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	43
Gambar 2.13	Persentase Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021	45
Gambar 2.14	Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	45
Gambar 2.15	Rasio Rumah Sakit, Dokter dan Tenaga Medis di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	46
Gambar 2.16	Jumlah SDM Kesehatan Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021	48
Gambar 2.17	Jenis Layanan JKN Tahun 2018-2021	51
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao	55
Gambar 3.2	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022	57
Gambar 3.3	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah, Bankeu Ternak, Subsidi Tahun 2020-2022	60

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 3.4	Program PIP SD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021	61
Gambar 3.5	Anggaran Program PIP SMP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021	61
Gambar 3.6	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas PKO Tahun 2018-2022	63
Gambar 3.7	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2022	66
Gambar 3.8	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Tahun 2018-2022	68
Gambar 3.9	Persentase Pelayanan KB Baru dan KB aktif di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021	71
Gambar 3.10	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kb Tahun 2018-2022	72
Gambar 3.11	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022	73
Gambar 3.12	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pertanian Tahun 2018-2022	75
Gambar 3.13	Alokasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018-2022	76
Gambar 3.14	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022	77
Gambar 3.15	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Peternakan Tahun 2018-2022	78
Gambar 3.16	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022	79
Gambar 3.17	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Ketahanan pangan Tahun 2018-2022	81
Gambar 3.18	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2022	82

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 3.19	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022	83
Gambar 3.20	Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022	84
Gambar 4.1	Program Unggulan Penanggulangan Kemiskinan	98
Gambar 4.2	Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	99
Gambar 4.3	Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2017-2022	100
Gambar 4.4	Perbandingan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten/Kota lainnya di NTT Tahun 2022	100
Gambar 4.5	Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	102
Gambar 4.6	Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	103
Gambar 4.7	Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	103
Gambar 4.8	Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022	104
Gambar 4.9	Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	105
Gambar 4.10	Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	105
Gambar 4.11	Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022	106
Gambar 4.12	Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	107
Gambar 4.13	Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022	108
Gambar 4.14	Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	109

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 4.15	Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	110
Gambar 4.16	Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika kompleks dalam pembangunan yang berkorelasi dengan berbagai dimensi yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar seseorang terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank* pada tahun 2009. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2022). Seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dengan konsep kemiskinan yang dijelaskan dalam buku "*The End Of Poverty*" (Sachs, 2005), menurutnya bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu permasalahan

pangan maupun non pangan. Dalam permasalahan non pangan, menyangkut pula di dalamnya adalah pendidikan dasar, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan transportasi (Pratomo, 2008).

Penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao masih cukup banyak, dengan tingkat penurunan kemiskinan yang masih belum signifikan dan fluktuatif. Berdasarkan data statistik tahun 2019, kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao mencapai 27,95 persen, tahun 2020 kemiskinan mencapai 27,54 persen mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dan pada tahun 2021 kemiskinan mencapai 28,08 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dibandingkan tahun 2020 (BPS 2020-2022), angka kemiskinan ini tentunya masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 dengan angka kemiskinan sebesar 20,99 persen (BPS,2022). Angka kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan pada tahun 2021, hal ini masih berkorelasi dengan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan secara khusus Kabupaten Rote Ndao yang mengakibatkan Pemerintah Daerah melakukan pembatasan sosial berdampak pada penurunan tingkat produktivitas dan perekonomian daerah. Akibat Pandemi Covid-19, memunculkan pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas, seperti mengurangi kumpul-kumpul, pesta, jalan-jalan dan memilih belanja online, akibatnya persewaan gedung, pesanan catering, percetakan, jasa transportasi, dan lain-lain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sehingga berimbas pada banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, hal lain juga akibat *lockdown* pembatasan sosial berskala besar dan *social distancing* menghambat produksi dan pemasaran produk-produk unggulan baik domestik maupun ekspor (Bank Dunia, 2020). Dampak perekonomian akibat Pandemi Covid-19 yaitu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 2,08 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,24 persen (BPS, 2022).

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao, maka pada tahun 2021 telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) melalui Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 276/KEP/HK/2021. Melalui

pembentukan payung hukum yang terintegrasi ini, maka diharapkan kerjasama menjadi semakin intens antara lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, sehingga tekad penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao bisa diterapkan secara sungguh-sungguh, terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi mulai dari aspek kebijakan, strategi, dan program. Selain itu, untuk menciptakan efektivitas penanggulangan kemiskinan, diperlukan pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan melalui mekanisme kerjasama dan koordinasi terhadap kebijakan, program antar Pemerintah maupun NGO/LSM dan masyarakat.

Pengentasan kemiskinan tidak cukup bila kemiskinan yang dilihat sebagai ketiadaan materi semata. Kemiskinan adalah persoalan relasional yang harus diperangi melalui identitas dan pemenuhan panggilan hidup semua *stakeholders* yang ada (Haning, 2007). Konsep ini sejalan dengan strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Gunnar Adler Karlsson yang dikutip Andre Bayo Ala (1981) *Pertama*, strategi jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusinya. *Kedua*, Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat, perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. *Kedua*, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Dalam upaya mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, maka dipandang perlu untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) agar kita dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dan mencari solusi dalam penanggulangan kemiskinan. Laporan ini juga merupakan *breakdown* dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, secara khusus berkaitan dengan program-program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan gambaran terkait kondisi kemiskinan yang berkorelasi dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan;
2. Mengkaji strategi kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan serta koordinasi di tingkat daerah, provinsi dan pusat;
3. Mengkaji komposisi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2018-2022;
4. Menguraikan dan menganalisis program unggulan penanggulangan kemiskinan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan;
5. Menguraikan rencana tindak lanjut program-program penanggulangan kemiskinan;
6. Memberikan rekomendasi serta saran dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Rote Ndao.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 276/KEP/HK/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024;
15. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 322.a/KEP/HK/2021 tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mengatasi Risiko Sosial.

1.4 Sistematika Penulisan Dokumen

Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Pada bagian bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan dokumen.
2. Bab II Gambaran Umum. Pada bagian bab ini menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, gambaran kondisi kemiskinan, dimensi pendidikan dan dimensi kesehatan.
3. Bab III Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan. Pada bagian bab ini menguraikan tentang koordinasi kelembagaan di tingkat daerah, Koordinasi Kelembagaan di tingkat provinsi dan pusat, komposisi anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2018-2022 dan pengendalian dan evaluasi.
4. Bab IV Capaian dan Analisis. Pada bagian bab ini menguraikan program unggulan penanggulangan kemiskinan dan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan.

5. Bab V Rencana Tindak Lanjut. Pada bagian bagian bab ini menguraikan permasalahan dalam pembangunan dan rencana tindak lanjut program penanggulangan kemiskinan.
6. Bab VI Penutup. Pada bagian bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Rote Ndao merupakan daerah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 120 pulau, 7 (tujuh) buah pulau berpenghuni dan 113 (seratus tiga belas) pulau tidak dihuni, dengan luas wilayah daratan 1.280,10 km². Pulau terluas adalah pulau Rote dengan luas 97,854 km² diikuti pulau Usu (Desa Tenalai) dengan luas 1,940 km².

Secara geografis wilayah Administrasi di Kabupaten Rote Ndao sebelah Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pukuafu, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Rote Ndao dibagi ke dalam 11 Kecamatan, 112 desa, 7 Kelurahan, 572 Dusun/Lingkungan, 804 RW dan 1.622 RT. Wilayah Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Landu Leko dan yang paling kecil adalah Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Ndao Nuse. Secara rinci luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rote Ndao dapat tersaji pada tabel 2.1 dan gambar 2.1 sebagai berikut:

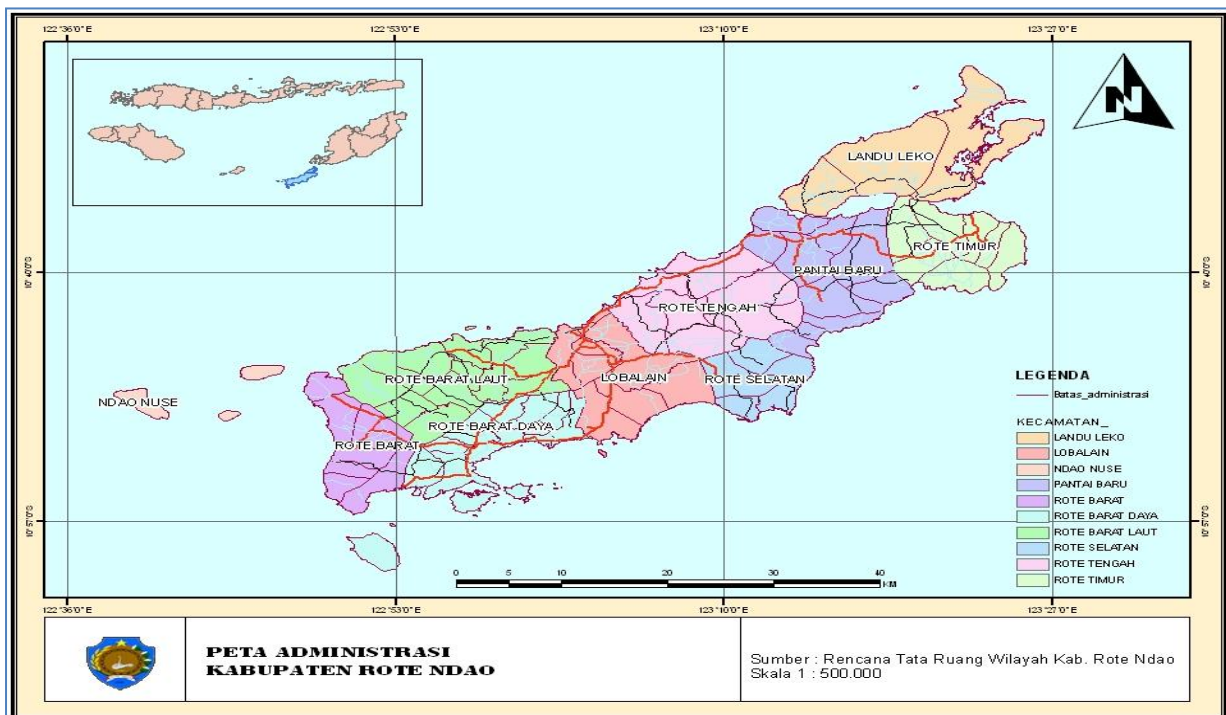
Tabel. 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah (%)
1.	Landu Leko	7	32	54	194,06	15,16
2.	Pantai Baru	15	98	201	176,18	13,76
3.	Rote Tengah	8	48	94	162,5	12,69
4.	Lobalain	18	75	187	145,7	11,38
5.	Rote Barat	7	41	88	116,28	9,08
6.	Rote Barat Daya	19	165	335	114,57	8,95

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah (%)
7.	Rote Timur	11	71	142	110,84	8,66
8.	Rote Barat Laut	12	115	215	80,08	6,26
9.	Rote Selatan	7	39	78	73,38	5,73
10.	Loaholu	10	66	132	76,66	5,99
11.	Ndao Nuse	5	36	72	14,19	1,11
	Jumlah total	119	804	1.622	1.280,10	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

Gambar. 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao



Sumber Data : Peta RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan Nusantara. Secara

geografis, daerah ini terletak di antara 10°25'LS sampai 11°15' LS dan di antara 121°49'BT sampai 123°26'BT dengan Batas-batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan laut sawu, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Pukuafu dan sebelah barat dengan Laut Sawu.

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah, Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan, juga terutama memiliki potensi bahari yang sangat besar. Kabupaten Rote Ndao memiliki luas perairan laut cukup luas, dengan total panjang garis pantai kurang lebih 330 km. Pulau Rote memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa diantaranya merupakan kawasan *surfing* terbaik dunia, yakni pantai Nemberala dan Pantai Bo'a, serta Pantai Mulut Seribu yang saat ini menjadi primadona bagi masyarakat Pulau Rote. Keindahan Pantai Mulut Seribu masuk dalam *Ring Of Beauty* yang dimana merupakan bagian dari program prioritas Provinsi NTT, secara otomatis masuk dalam prioritas pariwisata di NTT.

Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, yang dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, tetapi pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik antara Indonesia dan Australia karena berkaitan dengan kegiatan melaut oleh para nelayan Rote Ndao, dan juga sebagai tempat transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

3. Kondisi Kawasan

Wilayah Kabupaten Rote Ndao terdapat 120 pulau, dimana terdapat 7 pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Ndana, Nusa Manuk, Usu I, Usu II, dan sisanya 113 pulau tidak berpenghuni serta panjang garis pantai yang mencapai 330 km. Pengelolaan pulau di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah terkhususnya pulau-pulau berpenghuni dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau. Sedangkan untuk pulau yang tidak berpenghuni difokuskan pada tata kelola aset pada pemantauan aktifitas penguasaan lahan agar tidak dikuasai secara illegal.

Luas daerah menurut pulau yang dihuni dapat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Daerah Menurut Pulau Yang Dihuni

NO	PULAU	LUAS DAERAH (Ha)	PERSENTASE (%)
1.	Rote	97.854	76,44
2.	Usu	1.940	1,52
3.	Ndana	1.383	1,08
4.	Ndao	863	0,67
5.	Landu	643	0,50
6.	Nuse	566	0,44
7.	Doo	192	0,15
8.	Pulau Lainnya	24.569	19,19
	JUMLAH/TOTAL	1.280,10	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

2.1.2 Kondisi Demografi

1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Rote Ndao

Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao mencapai 145.972 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 114 orang per km². Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Rote Ndao lebih banyak tersebar di kecamatan Lobalain sebanyak 31.210 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Ndao Nuse 3.755 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 1,77 persen pada tahun 2010 sampai tahun 2021. Artinya pertumbuhan penduduk belum sesuai dengan target RPJMD, yaitu 3,80 % per tahunnya itu dipicu oleh faktor kelahiran dan migrasi penduduk serta faktor alami akibat semakin berkembangnya Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu Kabupaten

pemekaran di wilayah provinsi NTT. Tingkat kepadatan penduduk rendah yaitu di Kecamatan Landuleko sebesar 27 jiwa/Km² dan Kecamatan Rote Tengah sebesar 56 jiwa/Km². Gambaran mengenai jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Gambaran mengenai pertumbuhan penduduk Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk
Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	KEPADATAN PENDUDUK (Per Km²)
1	Lobalain	31.210	15.766	15.444	214
2	Rote Barat Laut	15.808	7.926	7.882	160
3	Rote Barat Daya	24.738	12.358	12.380	216
4	Pantai Baru	14.667	7.460	7.207	83
5	Rote Timur	14.533	7.310	7.223	131
6	Rote Barat	9.270	4.674	4.596	80
7	Rote Tengah	9.060	4.565	4.495	56
8	Rote Selatan	6.089	3.076	3.013	83
9	Landuleko	5.317	2.699	2.618	27
10	Ndao Nuse	3.755	1.845	1.910	265
11	Loaholu	11.525	5.843	5.682	156
JUMLAH/TOTAL		145.972	73.522	72.450	114

Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Rote Ndao terlihat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 73.522 lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yakni sebesar 72.450 dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 101, yang artinya, dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Gambaran

penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel 2.4
Perkembangan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan *Sex Ratio*
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio
1	2017	81.207	78.407	159.614	104
2	2018	84.283	81.524	165.807	103
3	2019	87.380	84.524	172.104	103
4	2020	72.428	71.336	143.764	102
5	2021	73.522	72.450	145.972	101

Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2010-2021

NO	KECAMATAN	2000-2010	2010-2021
1	Rote Barat Daya	1,65	2,04
2	Rote Barat Laut	1,85	1,98
3	Lobalain	3,45	2,08
4	Rote Tengah	1,27	1,06
5	Rote Selatan	1,17	1,47
6	Pantai Baru	1,52	1,51
7	Rote Timur	1,35	1,67
8	Landu Leko	-	1,41
9	Rote Barat	1,91	2,00
10	Ndao Nuse	-	1,75
11	Loaholu	*	1,33
JUMLAH/TOTAL		1,95	1,77

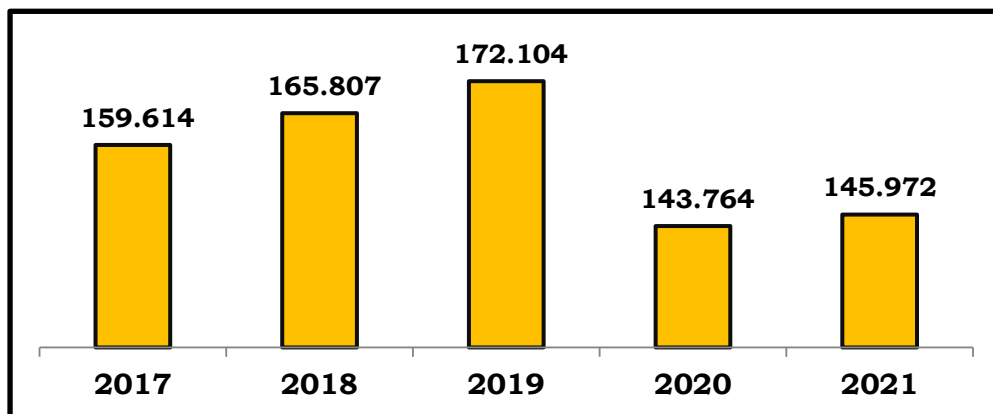
Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010-2022

Tabel 2.6
Distribusi Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rote Barat Daya	26.273	27.293	28.329	24.309	24.738
2	Rote Barat Laut	30.096	31.264	32.451	26.916	15.808
3	Lobalain	32.997	34.276	35.577	30.669	31.210
4	Rote Tengah	10.726	11.143	11.565	8.984	9.060
5	Rote Selatan	6.886	7.153	7.424	6.015	6.089
6	Pantai Baru	16.502	17.141	17.793	14.476	14.667
7	Rote Timur	16.097	16.721	17.356	14.343	14.533
8	Landu Leko	6.043	6.278	6.517	5.247	5.317
9	Rote Barat	9.884	10.268	10.658	9.113	9.270
10	Ndao Nuse	4.110	4.270	4.434	3.692	3.755
11	Loaholu	-	-	-	-	11.525
JUMLAH/TOTAL		159.614	165.807	172.104	143.764	145.972

Sumber: Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2018-2022

Gambar 2.2
Data Perkembangan Penduduk Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017-2021



Sumber : Rote Ndao Dalam Angka Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada gambar 2.2 di atas jumlah penduduk pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2.208 Jiwa dibandingkan tahun 2020.

2.2. Gambaran Kondisi Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao

2.2.1 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao

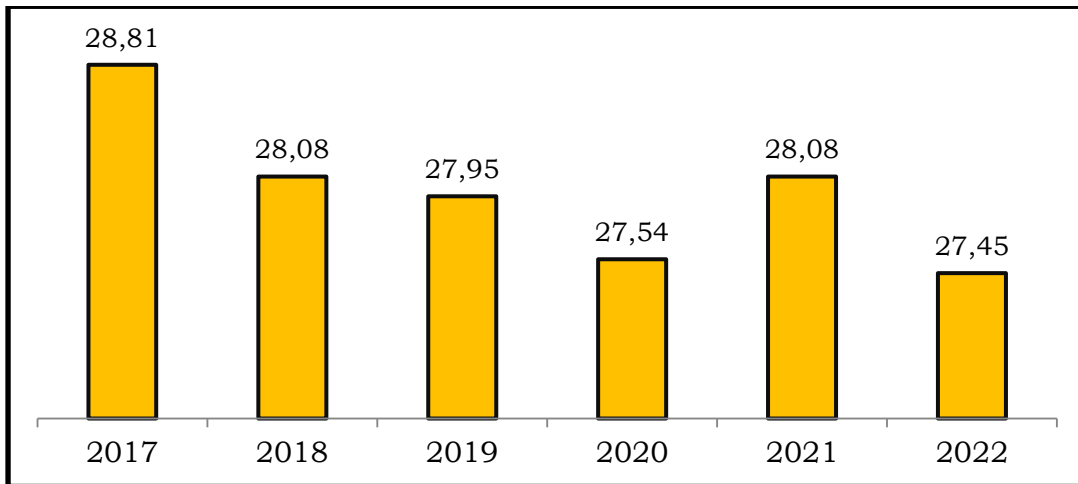
1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2017 mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 1,27 persen dari 28,81 persen menjadi 27,54 persen, sedangkan tahun 2021 angka kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 28,08 persen, peningkatan angka kemiskinan ini masih berkorelasi dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan secara khusus Kabupaten Rote Ndao yang mengakibatkan pemberlakuan pembatasan sosial yang berdampak pada penurunan tingkat produktivitas dan perekonomian. Akibat pandemi covid-19, memunculkan pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas, seperti mengurangi kumpul-kumpul, pesta, jalan-jalan, dan memilih belanja online. Akibatnya persewaan gedung, pesanan catering, percetakan, jasa transportasi, dan lain-lain kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sehingga berimbas pada banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan, Hal lain juga akibat *lockdown*, pembatasan sosial berskala besar dan *social distancing* menghambat produksi dan pemasaran produk-produk unggulan baik domestik maupun ekspor mengalami hambatan.

Tahun 2022 persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan sebesar 0,63 persen dari 28,08 persen menjadi 27,45 persen, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas dan perekonomian masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang sudah mulai membaik pasca Covid-19 sehingga roda perekonomian cenderung bergerak ke arah positif.

Secara rinci persentase penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:

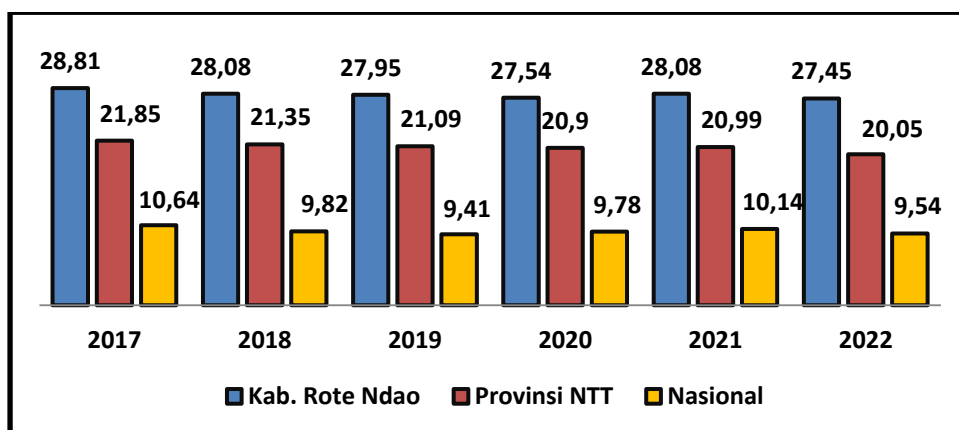
Gambar 2.3
 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao
 Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Tingkat kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2022 sebesar 27,45 persen, lebih tinggi 7 persen dari persentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 20,05 persen dan tertinggal 17,91 persen dari persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,54 persen. Secara rinci persentase kemiskinan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4
 Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional
 Tahun 2018-2022

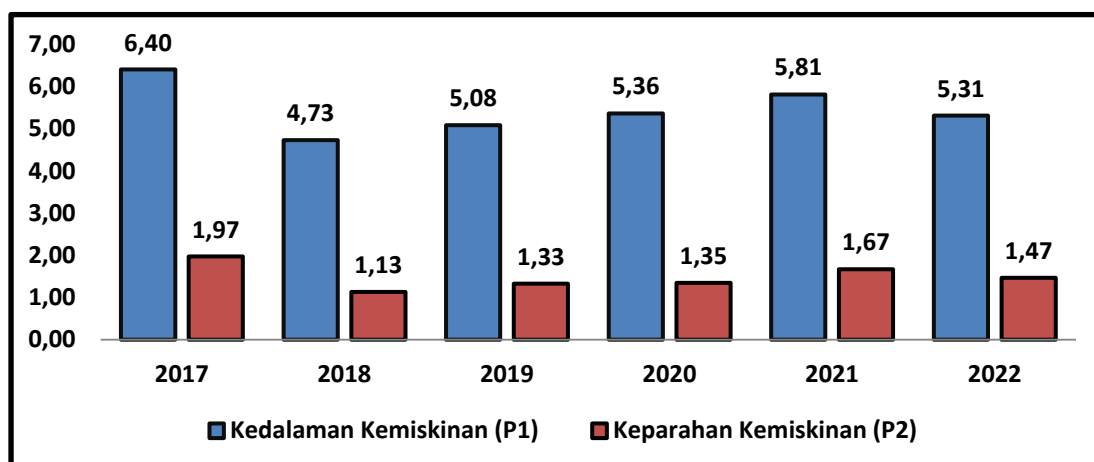


Sumber : BPS Tahun 2018-2022 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

1. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index/P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sepanjang kurun waktu 2017-2022, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2017 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 6,40 berkurang 4,73 pada Tahun 2018, meningkat pada Tahun 2021 menjadi 5,81 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 5,31. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2017 sebesar 1,97, menurun menjadi 1,13 pada tahun 2018, meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,67 dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,47. Secara rinci dijabarkan pada gambar 2.5 di bawah:

Gambar 2.5
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao (P2) Tahun 2017-2022



Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

2.2.2 KETENAGAKERJAAN

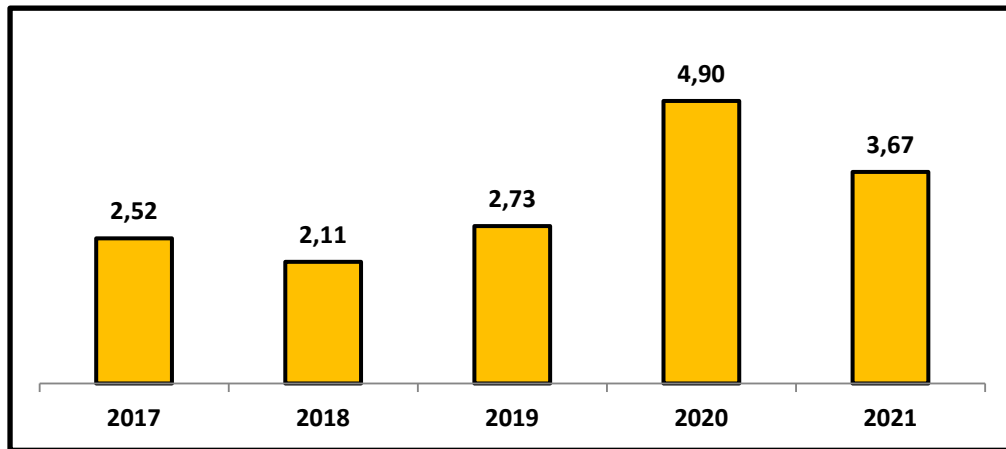
1. Tingkat Pengangguran Kabupaten Rote Ndao

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia produktif untuk bekerja, begitupun sebaliknya. Pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia.

Beberapa faktor penyebab pengangguran antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang minim, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kemiskinan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan sebagainya. Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya pertumbuhan ekonomi. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Sehingga pengangguran merupakan salah satu penghambat ekonomi yang harus diatasi dengan baik.

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan penurunan yang fluktuatif, hal ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan perkerjaan dan upaya penciptaan lapangan kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan permasalahan lain yaitu pandemi Covid-19 menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sulit dicari. Berikut tabel 2.6 tingkat pengangguran di Kabupaten Rote Ndao:

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

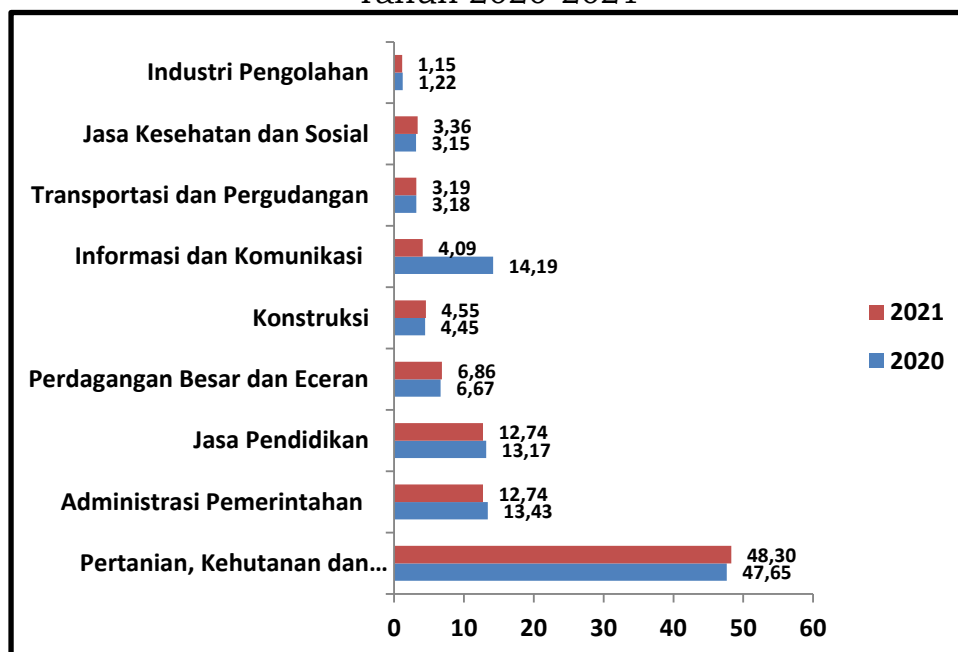


Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

2. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja

Penduduk yang bekerja pada lapangan kerja pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 sebesar 48,30%, tergolong cukup besar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut:

Gambar 2.7
Persentase Penduduk Yang Bekerja Pada Lapangan Usaha Tahun 2020-2021

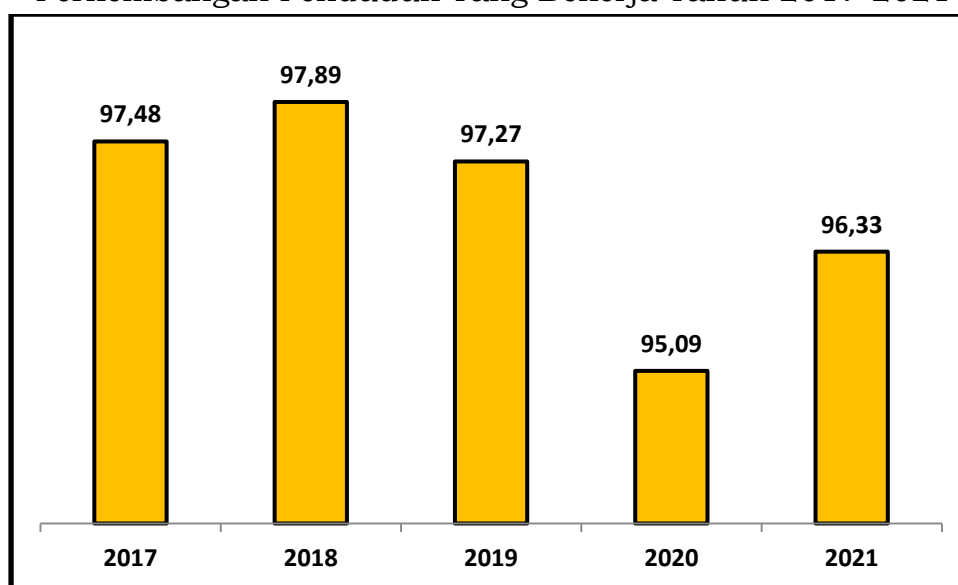


Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2022

3. Perkembangan Penduduk yang Bekerja

Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan Jumlah penduduk yang bekerja yaitu 96,33% dibandingkan tahun 2020 sebanyak 95,09% atau naik sebesar 1,24%. Peningkatan ini relevan dengan menurunnya tingkat pengangguran yang mencapai 3,67% di tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 naik 4,90% atau meningkat sebanyak 2,17%, sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel berikut:

Gambar 2.8
Perkembangan Penduduk Yang Bekerja Tahun 2017-2021



Sumber Data: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Tabel 2.7
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021

Umur Penduduk yang Bekerja	2020	2021
15-19	3.833	14.529
20-24	9.514	15.513
25-29	11.509	16.716
30-34	11.450	14.744
35-39	9.421	12.440
40-44	8.662	10.402
45-49	8.012	9.781

Umur Penduduk yang Bekerja	2020	2021
50-54	8.707	9.603
55-59	7.218	8.939
60+	11.423	21.148
Total	89.749	133.185

Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2022

Berdasarkan gambar diatas pada tahun 2020 usia penduduk yang bekerja sejak umur 15 tahun hingga umur 40 tahun masih mendominasi dengan jumlah sebanyak 54.389 Jiwa dan yang berumur 45 keatas sebanyak 35.860 Jiwa, sedangkan tahun 2021 usia penduduk yang bekerja sejak umur 15 tahun hingga umur 40 tahun masih mendominasi dengan jumlah sebanyak 84.344 Jiwa dan yang berumur 45 keatas sebanyak 49.471 Jiwa.

2.2.3 SOSIAL

Kebijakan pembangunan urusan sosial diarahkan pada pemberdayaan fakir miskin komunitas adat (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, panti asuhan/jompo, penyandang cacat dan eks trauma, eks penyandang penyakit sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana disajikan pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Pelayanan Urusan Sosial di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase keluarga fakir miskin yang diberdayakan (%)	N/A	N/A	N/A	1.33	1.33
Persentase PMKS yang tertangani (%)	65.38	65.38	46.15	42.18	65.38
Cakupan peserta JKN / Jamkesda (jiwa)	N/A	N/A	N/A	78.847	68.474

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)	14.37	14.91	10.71	12.82	14.59
Persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) (%)	N/A	N/A	N/A	51.90	38.39
Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	N/A	N/A	N/A	12.82	14.59
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	N/A	N/A	N/A	4.30	18.60
Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	N/A	N/A	N/A	10.90	2.17
Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	N/A	N/A	N/A	100	91.49
Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS (%)	N/A	N/A	N/A	100	81.51

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

2.2.4 Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Kependudukan

Fokus Prioritas Bidang Kependudukan yaitu Perbaikan proses pendataan dan registrasi penduduk, Pengendalian dan evaluasi manajemen penduduk dan Peningkatan kualitas dan status Keluarga Sejahtera. Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Urusan administrasi kependudukan juga merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk pelayanan dasar khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting

bagi kebijakan di sektor lain yakni bidang politik, ekonomi dan sosial. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Hal tersebut didukung pula dengan Permendagri 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, dimana kedepan data yang digunakan adalah data tunggal integrasi dari BPS dan Kependudukan.

Urusan administrasi kependudukan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu/e-KTP. Perkembangan capaian pelayanan kependudukan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.9:

Tabel 2.9
Layanan Administrasi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	82.22	88.70	90.80	91.28	90.90
Rasio bayi berakte kelahiran	35.26	53.42	56.38	54.66	54.66
Rasio pasangan berakte nikah	23.12	27.23	28.91	30.40	48.03
Penerapan KTP nasional berbasis NIK (%)	100	100	100	100	100
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	82.22	88.70	90.80	91.28	90.90
Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	32.75	41.39	41.24	100	78.55

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao Tahun 2017-2021

Jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rote Ndao mencapai 145.972 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 114 orang per km². Pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Rote Ndao lebih

banyak tersebar di kecamatan Lobalain sebanyak 31.210 jiwa dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan Ndao Nuse 3.755 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk mencapai angka 1,77 % pada tahun 2010 sampai tahun 2021. Tingkat kepadatan penduduk rendah yaitu di Kecamatan Landuleko sebesar 27 jiwa/Km² dan Kecamatan Rote Tengah sebesar 56 jiwa/Km². Gambaran mengenai jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KEPADATAN PENDUDUK (Per Km ²)
1	Lobalain	31.210	15.766	15.444	214
2	Rote Barat Laut	15.808	7.926	7.882	160
3	Rote Barat Daya	24.738	12.358	12.380	216
4	Pantai Baru	14.667	7.460	7.207	83
5	Rote Timur	14.533	7.310	7.223	131
6	Rote Barat	9.270	4.674	4.596	80
7	Rote Tengah	9.060	4.565	4.495	56
8	Rote Selatan	6.089	3.076	3.013	83
9	Landu Leko	5.317	2.699	2.618	27
10	Ndao Nuse	3.755	1.845	1.910	265
11	Loaholu	11.525	5.843	5.682	156
JUMLAH/TOTAL		145.972	73.522	72.450	114

Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

2. Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

Sampai dengan tahun 2021, Persentase laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari 3,79% (tahun 2017) menjadi 1,77% pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penekanan angka pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhinya adalah berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai perlunya menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk dengan mengikuti anjuran pemerintah melalui program keluarga berencana. Secara lengkap dapat dilihat perkembangannya pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Kualitas Layanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) %	3.79	3.88	3.80	1.83	1.77
<i>Total fertility rate</i> (TFR) (%)	3.80	3.60	3.24	3.60	3.50
Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB (%)	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	14.00	14.00	100	100	100
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan	2	2	2	2	2

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
informal yang melakukan pendidikan kependudukan					
Ratio akseptor KB	55.57	69.95	55,60	55.65	79.05
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	47.58	44.63	46.09	46,09	79.05
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	-	17	17	17	18
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,97	0,97	0.98	0,98	0,98
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	18.01	22.11	18.54	7,15	7,00
Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao Tahun 2017-2021

2.3 Dimensi Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peranan penting dalam upaya penurunan kemiskinan melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk penerapan program wajib belajar. Hal ini relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan serta mengacu pada salah satu tujuan SDG's yaitu mengenai pendidikan berkualitas pada tujuan ke-4 serta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, sumber daya, anggaran dan program yang tepat dan memadai. Segala upaya telah dilakukan untuk dapat memacu peningkatan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu program prioritas di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan urusan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensial dan kompetitif, dimulai dari menyiapkan dan mengembangkan kualitas

pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan menengah atas, pendidikan non formal (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA atau SMK/MAK), pendidikan luar biasa, pendidikan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta program manajemen pelayanan pendidikan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao telah menunjukkan kemajuan dan keberhasilan dari berbagai jenjang pendidikan. Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 memiliki 122 Sekolah Dasar Negeri dan 25 Sekolah Dasar Swasta yang tersebar di 10 kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP terdiri dari 40 sekolah negeri dan 3 Sekolah swasta. Untuk tingkat pendidikan SMA memiliki 9 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta, 3 sekolah kejuruan negeri dan 2 Sekolah kejuruan swasta.

Kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah dan Angka Melek Huruf.

Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM di Kabupaten Rote Ndao cenderung fluktuatif pada tahun 2016 sebesar 81,71 persen, tahun 2017 sebesar 82,51 persen, tahun 2018 sebesar 83,68 tahun 2019 sebesar 82,88 persen, tahun 2020 sebesar 83,64 persen dan tahun 2021 sebesar 95,04 persen, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Rote Ndao pada tingkat pendidikan tertentu. Untuk mengantisipasi penurunan angka APM maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu lebih giat lagi memacu pembangunan pendidikan melalui peningkatan program/kegiatan pada sektor pendidikan, melakukan sosialisasi program wajib belajar 9 tahun, dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Jika APM mencapai titik tertinggi yaitu 100 persen, artinya semua

murid/siswa selaku peserta didik telah bersekolah sesuai usia dan sekolah/kelompok belajar pada jenjang pendidikannya.

Dengan kisaran APM penduduk usia 7-12 tahun usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2017 sebesar 94,57 persen, meningkat pada tahun 2018 sebesar 96,24 persen, tahun 2019 sebesar 95,23 persen, tahun 2020 meningkat sebesar 95,42 persen, dan tahun 2021 sebesar 95,04 persen nilai APM ini masih berada di bawah rata-rata APM Provinsi NTT (96,04%).

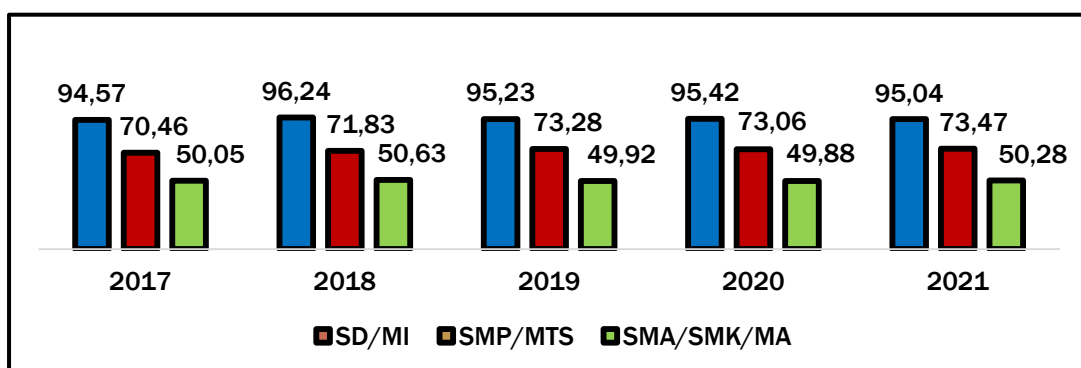
Nilai APM SMP/MTs yaitu penduduk usia 13-15 tahun secara total mencapai 70,45 persen tahun 2017, persentase tersebut meningkat menjadi 71,83 persen tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat sebesar 73,28 persen, tahun 2020 mengalami penurunan 0,22 persen menjadi sebesar 73,06 persen dan tahun 2021 sebesar 73,47 persen. Jika dibandingkan dengan nilai APM rata-rata Provinsi NTT sebesar 69,99 persen nilai APM Kabupaten Rote Ndao lebih tinggi sebesar 3,48 persen.

Nilai APM SMA/SMK/MA yaitu penduduk usia 16-18 tahun secara total 54,05 persen tahun 2017, menurun menjadi 50,63 persen pada tahun 2018, 50,63 persen pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 49,88 persen, dan tahun 2021 sebesar masih di bawah rata-rata APM Provinsi NTT yang sebesar 54,29 persen.

Angka Partisipasi Murni Kabupaten menurut jenjang pendidikan disajikan dalam gambar 2.9 berikut:

Gambar 2.9

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021



Sumber Data: BPS Rote Ndao dan Provinsi NTT Tahun 2018-2022

Analisa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao mempunyai korelasi terhadap seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikan.

Dalam rangka peningkatan APM, strategi yang diterapkan yaitu :

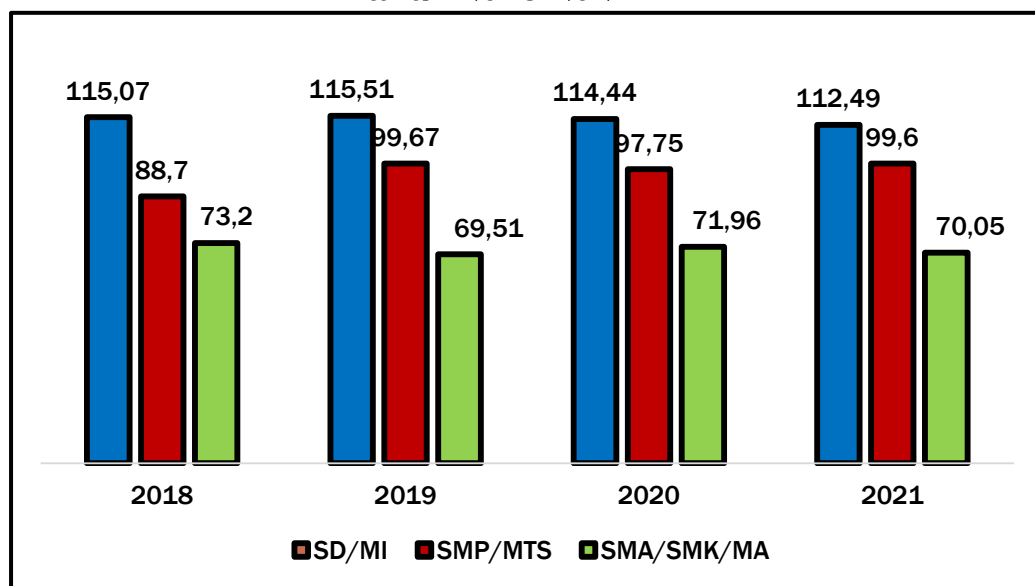
- a. Optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan.
- b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan di wilayah tertentu, terutama di wilayah pertanian, dengan dukungan fasilitas pendidikan.
- c. Optimalisasi aksesibilitas pendidikan berdasarkan kebutuhan wilayah, terutama di wilayah pertanian, melalui peningkatan daya tampung siswa dan penataan guru.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah yang membutuhkan.
- e. Pemberian jaminan pendidikan daerah bagi siswa berupa beasiswa.
- f. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wajib belajar 12 tahun.
- g. Peningkatan kepedulian penyelenggara pendidikan terhadap masyarakat.
- h. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu indikator pendidikan selain APM adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh anak yang berusia di bawah 6 tahun tetapi sudah bersekolah di tingkat SD dan anak yang berusia 13 tahun masih bersekolah di tingkat SD.

APK di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 untuk tingkat pendidikan SD/MI sebesar 115,07 persen, meningkat di tahun 2019 sebesar 115,51 persen atau meningkat 0,44 persen, tahun 2020 turun sebesar 114,44 persen dan tahun 2021 sebesar 112,49 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2018 APK sebesar 88,70 persen dan meningkat menjadi

99,67 persen di tahun 2019 atau meningkat 10,97 persen, tahun 2020 mengalami penurunan 1,92 persen menjadi sebesar 97,75 persen dan tahun 2021 sebesar 99,60 persen. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2018 sebesar 73,20 persen dan menjadi 69,51 persen tahun 2019 atau menurun sebesar 3,69 persen, tahun 2020 meningkat sebesar 71,96 persen, tahun 2021 sebesar 70,05 persen. APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018-2021 disajikan pada gambar 2.10 berikut:

Gambar 2.10
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2018-2021



Sumber Data: BPS Kab. Rote Ndao dan Provinsi NTT Tahun 2019-2022

Perkembangan indikator APK pada tiga jenjang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan angka yang fluktuatif, jika disandingkan dengan persentase angka kemiskinan maka dapat dianalisa perkembangan angka kemiskinan dan APK berfluktuasi, namun perkembangannya sejalan dimana angka kemiskinan mengalami penurunan dan APK pada jenjang SD/MI mengalami peningkatan berada di atas angka 100 persen, sedangkan jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan dan jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan yang menjadi indikator APK sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Fenomena ini menggambarkan kemiskinan berdampak

terhadap daerah karena belum mampu menampung usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya atau masih terdapat penduduk yang bersekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan dan dasar evaluasi kebijakan yang telah dijalankan. APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Jika APS mencapai 100% pada setiap jenjang umur maka menunjukkan tidak ada penduduk yang putus sekolah/belum/tidak pernah bersekolah pada jenjang umur usia sekolah. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan Paket C) turut diperhitungkan. APS dibagi dalam 5 (lima) klasifikasi menurut kelompok umur yaitu APS 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

APS kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2018 sebesar 98,23 persen, tahun 2019 sebesar 98,45 persen, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 98,86 persen dan pada tahun 2021 sebesar 98,57 persen. Nilai APS Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata APS Provinsi NTT sebesar 98,49 persen.

APS kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2018 sebesar 94,95 persen, tahun 2019 sebesar 95,08 persen, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 94,14 persen dan tahun 2021 sebesar 94,37 persen. Nilai APS Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata APS Provinsi NTT sebesar 95,25 persen.

APS kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2018 sebesar 74,83 persen, tahun 2019 sebesar 75,04 persen, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 75,61 persen dan tahun 2021 sebesar 75,76 persen bila dibandingkan dengan nilai rata-rata APS Provinsi NTT sebesar 74,92 persen, maka nilai APS kelompok umur 16-18 tahun lebih tinggi 0,69 persen.

Selanjutnya pada jenjang umur 19-24 tahun 2020 menunjukkan banyaknya penduduk Kabupaten yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi dengan nilai APS hanya mencapai 43,27%.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS menggantikan komponen angka melek huruf pada metode lama. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Rote Ndao tahun 2017 adalah sebesar 12,91 tahun menjadi 13,19 tahun pada tahun 2021 dan Provinsi NTT pada tahun 2021 angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,20 tahun. Perkembangan HLS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao,
NTT dan Nasional Tahun 2017-2021

Ket	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Rote Ndao	12.91	13.21	13.17	13.18	13,19
Provinsi Nusa Tenggara Timur	13,07	13,1	13.15	13,18	13,20
Nasional	12,85	12,91	12.95	12,98	13,08

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao 2022, BPS Prov. NTT 2022, Statistik Indonesia 2022

Angka harapan lama sekolah di Rote Ndao mengalami sedikit peningkatan dari 13,18 tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,19 tahun pada tahun 2021. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2020, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,19 tahun atau minimal jenjang Diploma I.

Berikut capaian kinerja pelayanan umum urusan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao sampai Tahun 2021:

Tabel 2.13
Kualitas Pelayanan Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100,64	106,05	93,30	56,35	57,33
2	Angka Partisipasi Kasar (%)	100,64	106,05	106	104,01	61,58
3	Angka partisipasi murni (%)					
	- Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)	94,57	92,90	84,30	90,42	83,53
	- Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B (%)	70,45	74,45	62,80	77,00	54,99
4	Angka putus sekolah (orang)					
	- Angka putus sekolah (APS) SD/ MI (orang)	37	45	10	20	9
	- Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs (orang)	14	11	11	7	6
5	Fasilitasi Pendidikan :					
	- Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	23,45	27,59	33,62	49,98	61,59
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	32,50	34,15	42,15	57,14	71,11

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
6	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (%)	60,52	61,25	67,98	64,87	65,96
7	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000)	47	45	48,89	46,95	46,50
8	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	46,72	39	47,45	41,96	42,80
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	72,79	75,15	28,57	78,50	84,57
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	62,99	81,57	81,96	83,19	84,32

Sumber : Dinas PKO Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurun dari 93,30 pada tahun 2019, menjadi 56,35 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran orang tua untuk mendaftarkan anaknya dalam Pendidikan Anak Usia Dini karena merebaknya wabah COVID-19 di kalangan sekolah. Namun angka ini kembali meningkat menjadi 57,33% pada tahun 2021. Kondisi fasilitas pendidikan, baik itu tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari 33,62% untuk SD/MI pada tahun 2019 menjadi 61,59% pada tahun 2021, sedangkan untuk SMP/MTs 42,15% pada tahun 2019 menjadi 71,11% pada tahun 2021. Salah satu faktor penentunya adalah adanya bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan pada tahun 2021.

2.4 Dimensi Bidang Kesehatan

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang adalah faktor kesehatan. Kesehatan berdampak pada segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap orang berhak atas kesehatan dan negara bertanggung jawab atas kesehatan warganya, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Kesehatan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang menjadi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan salah satu pilar pengentasan kemiskinan dan faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, sehingga tidak cukup hanya dipahami dari dimensi ekonomi atau material yang mengartikan kemiskinan sebagai minimnya aset yang dimiliki. Kesehatan dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat karena kesehatan seseorang yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan berpotensi membawa seseorang pada status kesehatan yang rendah. Sejalan dengan itu maka berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan.

Untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao maka fokus utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan seperti bidan, dokter umum maupun spesialis dan penyiapan sarana prasarana kesehatan yang memadai. Prioritas intervensi dalam bidang kesehatan di Kabupaten Rote Ndao adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) dengan melakukan intervensi pada jumlah tenaga bidan dan tenaga penyuluhan gizi untuk ibu hamil dan balita, jumlah tenaga dokter dan perawat untuk mengurangi angka keluhan kesehatan. Permasalahan lain yang juga yang perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah, yaitu stunting.

Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang berdampak pada tumbuh kembang anak dan ditandai dengan tubuh pendek pada anak balita dan baduta yang diikuti dengan perkembangan otak yang melambat tidak sesuai dengan pertumbuhan anak pada usia yang sama. *Stunting* tidak terjadi begitu saja melainkan dimulai dari janin hingga sang anak menginjak usia 2 tahun akibat dari minimnya asupan nutrisi pada usia 1000 hari pertumbuhan, kurangnya edukasi terkait asupan gizi saat hamil, kondisi kesehatan ibu yang buruk, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk, akses air bersih dan infeksi penyakit menjadi faktor penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan tenaga penyuluh kesehatan agar masyarakat semakin sadar dalam menggunakan jasa tenaga kesehatan yang disiapkan dan perlu adanya penambahan jumlah sarana kesehatan untuk kecamatan dan desa yang dimekarkan. Percepatan penurunan *stunting* menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Rote Ndao karena pada titik tertentu *stunting* berkorelasi dengan kemiskinan sehingga penanganan kemiskinan yang efektif akan berdampak terhadap penurunan prevalensi *stunting*. Upaya ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Kebijakan urusan kesehatan Kabupaten Rote Ndao terkait dengan perwujudan misi RPJMD tahun 2019-2024 yaitu percepatan penanggulangan masalah kesehatan dan gizi buruk yang berakibat pada tingginya angka

stunting, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah mencanangkan program prioritas melalui penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, program perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya, pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita dan lansia serta program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Capaian kinerja aspek pelayanan umum urusan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.14, 2.15 berikut :

Tabel 2.14
Kualitas Pelayanan Urusan Kesehatan
Tahun 2017 – 2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Posyandu aktif	11,76	12,7	6,14	6,0	5,9
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk(/ 1000)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Angka Kematian Bayi (AKB)/1000KH	19,26	19,92	19,21	19,46	18,94
Angka kelangsungan hidup bayi	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98
Angka kematian balita/1000KH	28	28	26	26	20
Angka kematian neonatal/1000KH	11	15	13	14,7	15,7
Angka kematian ibu/100.000KH Khusus 2020: Jumlah kematian ibu	126	190	209	170,7 1	357,4 0

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,43	87,70	88,00	70,23	87,44
Cakupan desa/kel UCI (%)	38,20	23,50	30,00	24,00	61,34
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Persentase anak usia 1 tahun yang imunisasi campak	75,06	90	90	69,3	91,1
Non polio AFP rate/100.000 penduduk	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus
Cakupan penemuan & penanganan kasus TBC	0,02	8,46	15	33,58	2,79
Tingkat kematian karena tuberkulosis/100.000 penduduk	2,60	2,50	2,50	5,97	4,8
Penderita diare yang ditangani	91,49	61,37	80,00	80,09	23,7
Angka kejadian malaria	0,70	0,36	0,10	0,014	0,31
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi (%)	70,31	83,70	100	100	71,88
Cakupan kunjungan Bumil	67,62	48,12	100	90,00	97,4
Cakupan pelayanan nifas	89,25	87,70	100	65,8	84,5
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	56,39	34,20	35	89	22,64
Cakupan pelayanan anak Balita	98,90	76,63	100	65,2	79,3
Cakupan pelayanan darurat level 1 yang harus diberikan di RS	100	100	100	100	100
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	Tidak ada kasus	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

Tabel 2.15
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Posyandu per Satuan Balita	17.77	29.65	29,41	3,02	2,4
Rasio Puskesmas, Poliklinik,, Pustu Per Satuan Penduduk	0.6	0.6	0,6	0,6	0,6
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0.01	0.01	0,01	0,01	0,01
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0.1	0.1	0,1	0,1	0,1
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	1.3	1.3	1,3	1,3	1,3

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas untuk aspek pelayanan umum bidang kesehatan sudah mengalami peningkatan namun kondisi ini berbanding terbalik dengan permasalahan kesehatan masyarakat khususnya angka/jumlah kematian bayi dan kematian ibu yang cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk menurunkan AKB dengan mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas. Selain itu sedang diupayakan kebijakan prioritas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rote Ndao ditempuh dengan cara mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi Puskesmas pembantu, menempatkan tenaga bidan di Pustu, memperpanjang waktu pelayanan di Puskesmas Rawat Inap serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Angka/Jumlah Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi yaitu tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Semakin tinggi AKB di suatu wilayah dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut masih relatif rendah. Kematian bayi pada umumnya disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Pneumonia, Diare, Observasi Febris, Syok Haemoragik dan Demam.

Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas seperti perdarahan, preeklamsia/eklamsia, infeksi, persalinan macet dan abortus, faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil seperti usia ibu *Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu sering melahirkan dan Terlalu dekat jarak kelahiran* maupun yang mempersulit proses penanganan kedaruratan kehamilan, persalinan dan nifas seperti *Terlambat mengenali tanda bahaya dan mngambil keputusan, Terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan Terlambat dalam penanganan kegawatdaruratan*. Faktor lain yang berpengaruh adalah ibu hamil yang menderita penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, sifilis; penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, gangguan jiwa; maupun yang mengalami kekurangan gizi.

Angka kematian ibu (AKI) yang terus meningkat terjadi di Kabupaten Rote Ndao disebabkan karena faktor pandemi COVID-19, status gizi, kesehatan perorangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi mereka serta masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, akar penyebab kematian ibu adalah karena 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

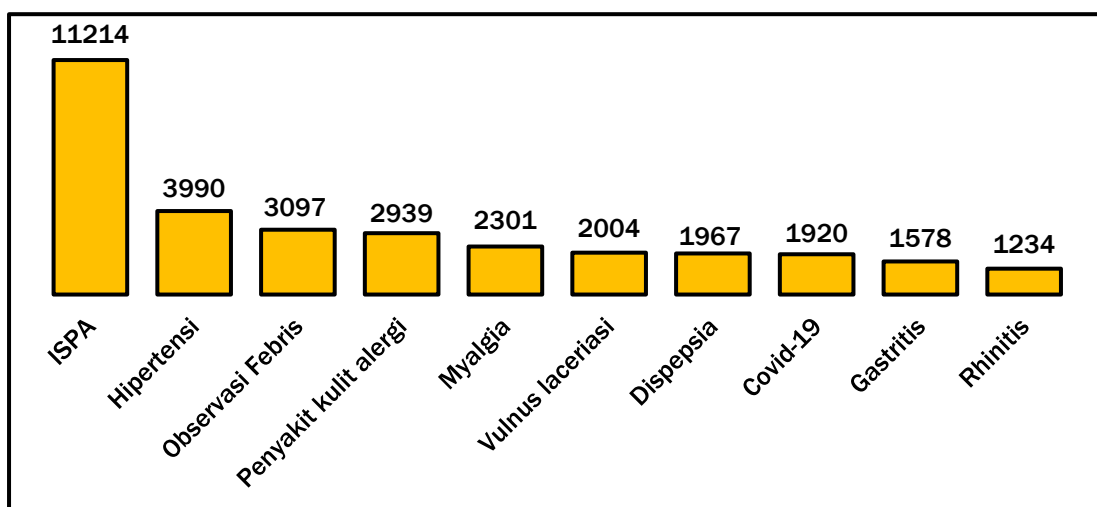
Kematian dan kesehatan pada bayi sangat terkait dengan imunisasi, status gizi, penyakit menular, kemiskinan dan juga fasilitas kesehatan yang tersedia. Disparitas cakupan pelayanan karena kendala geografis, sosial ekonomi dan klasifikasi tempat tinggal masih menjadi kendala secara nasional. Cakupan pelayanan selama persalinan dan pasca persalinan haruslah dapat menjangkau masyarakat miskin dan sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kematian bayi atau meningkatkan kelangsungan hidup bayi.

Selain indikator Mortalitas untuk mengukur derajat kesehatan maka keberhasilan pembangunan kesehatan juga diperlukan indikator lainnya untuk mendukung meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pembangunan kesehatan yakni Indikator Morbiditas (Kesakitan) dan Status

Gizi turut mempengaruhi derajat kesehatan di suatu daerah. Data Angka Kesakitan (Morbiditas) penduduk yang berasal dari masyarakat yang diperoleh melalui studi morbiditas dan hasil pengumpulan data laporan bulanan dari puskesmas serta sarana pelayanan kesehatan. Gambaran Angka Kesakitan ini disajikan dalam bentuk 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak dari data pasien rawat jalan di puskesmas selama tahun 2021 dan status gizi masyarakat disajikan dalam data pada gambar 2.11 berikut :

Gambar 2.11

Jenis Penyakit Terbesar Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021



Sumber Data: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2022 & Dinkes Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyakit infeksi masih merupakan penyakit yang sering terjadi di masyarakat dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit tidak menular. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah karena kejadian penyakit infeksi ini sangat berkaitan erat dengan faktor sanitasi lingkungan yang tidak sehat, perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat, dan kondisi tubuh yang rentan terhadap penyakit (berkaitan erat dengan asupan gizi sehari-hari).

Jika dilihat dari data di atas maka penyakit terbesar berturut-turut terjadi tahun ini adalah ISPA, Hipertensi, Observasi Febris, Penyakit kulit alergi, Myalgia, Vulnus laceriasi, Dispepsia, Covid-19, Gastritis dan Rhinitis. Apabila dikaji lebih lanjut terjadinya penyakit-penyakit tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan lingkungan, air bersih, jamban keluarga dan

kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dapat dilihat juga pada urutan keempat penyakit terbesar adalah hipertensi yang merupakan penyakit tidak menular (PTM). Jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi pergeseran penyakit tidak menular khususnya hipertensi yang pada tahun lalu berada pada posisi penyakit terbesar kedua. Untuk itu diperlukan pencegahan serta perubahan pola hidup masyarakat melalui program GERMAS dan PHBS.

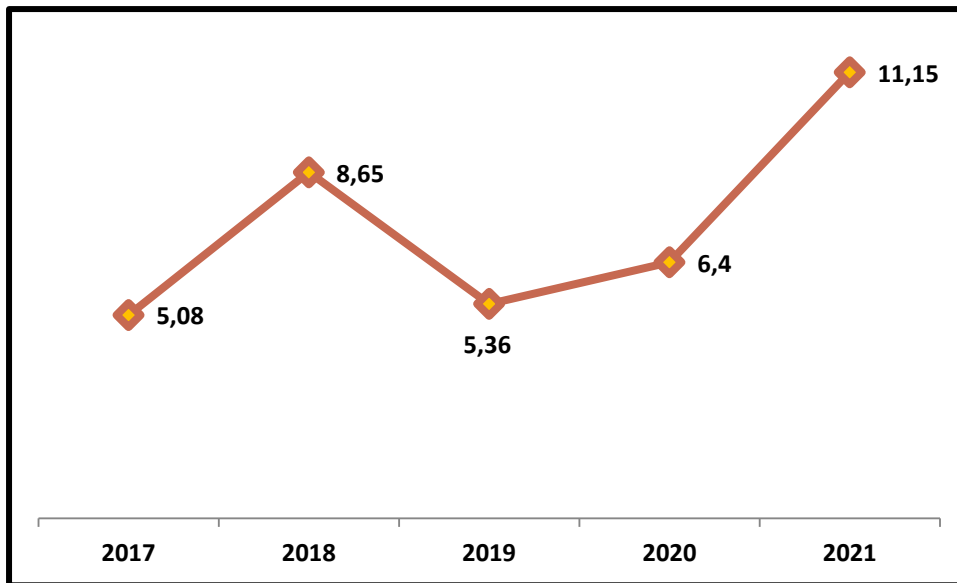
1. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Penyebab terjadinya BBLR antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, kurang asupan gizi waktu dalam kandungan ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi dan belum sepenuhnya pembentukan organ-organ tubuhnya yang biasanya akan menjadi penyebab utama kematian bayi.

Pada pemeriksaan kehamilan, kurangnya asupan gizi ditandai dengan hasil pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm (kurang energi kronik/KEK). Inilah mengapa pemeriksaan kehamilan perlu dilakukan secara teratur agar dapat terdeteksi secara dini sehingga mendapatkan konseling dan terapi yang sesuai. Dengan demikian tidak berdampak pada kelahiran dengan BBLR. Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 jumlah BBLR sebanyak 312 orang (11,15%) dan merupakan kasus tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2020 jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebanyak 146 orang (3,61%) menurun dibandingkan tahun 2019 jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebanyak 124 orang (5,36%) dari 2.312 bayi baru lahir ditimbang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah bayi lahir dengan berat badan lahir rendah sebanyak 175 orang (8,65%) dari 2.024 bayi baru lahir ditimbang maka terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Data Trend BBLR di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021 disajikan Pada gambar 2.12 berikut :

Gambar 2.12

Trend BBLR di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

2. Status Gizi Balita

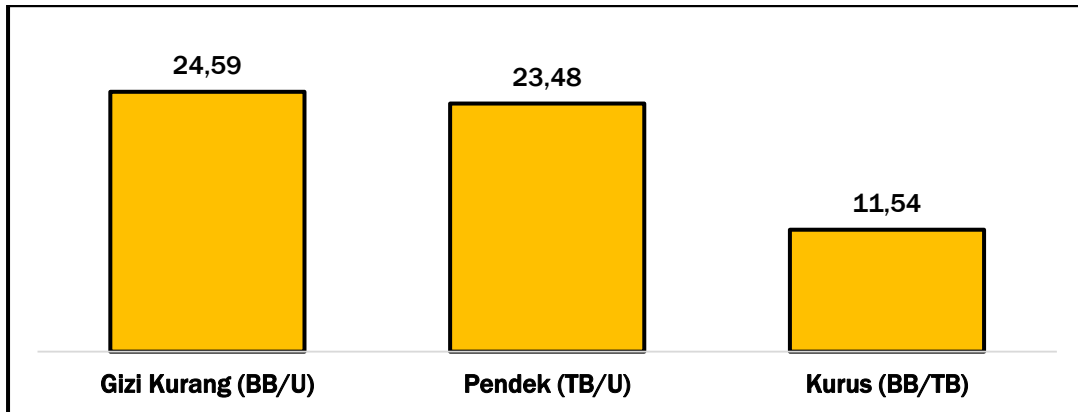
Keadaan status gizi balita di Kabupaten Rote Ndao dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Skrining pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan. Jika ternyata balita tersebut merupakan kasus buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di Posyandu dan Puskesmas. Jika ternyata terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di Puskesmas maka segera dirujuk ke rumah sakit. Jumlah seluruh balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 13.739 balita, yang di timbang sebanyak 9.451 balita (68,79%). Pada balita usia 0-59 bulan, hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi kurang adalah 13,8% dan menurut hasil RISKESDAS tahun 2018 juga Provinsi NTT merupakan provinsi dengan

persentase gizi kurang terbesar. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang diselenggarakan oleh Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2.024 balita (21,42%). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu Kabupaten yang berkontribusi memberikan persentase gizi kurang terbesar di tingkat Provinsi NTT. Selain itu juga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) maka angka ini juga mengalami peningkatan (5,83%).

Keadaan pertumbuhan anak yang tidak wajar yaitu pendek dan sangat pendek atau yang sering disebut sebagai stunting merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. Persentase balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia berdasarkan Riskesdas tahun 2018 adalah 11,5% dan 19,3%. Sedangkan pada Tahun 2019 balita usia 0-59 bulan di Kabupaten Rote Ndao yang terdektesi kategori pendek sebanyak 2.114 balita (24,35%). Jika dibandingkan dengan tahun 2018 maka angka ini mengalami penurunan (25,46%). Kategori balita kurus dan sangat kurus merupakan status gizi yang berdasarkan pada indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Persentase balita usia 0-59 bulan di Indonesia pada Riskesdas tahun 2018 sangat kurus yaitu sebesar 3,5% dan kurus sebesar 6,7%. Balita usia 0-59 bulan pada Tahun 2019 di Kabupaten Rote Ndao dengan kategori kurus sebanyak 1422 balita (11,03%). Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (8,03%). Data status gizi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.13 berikut:

Gambar 2.13

Persentase Status Gizi Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

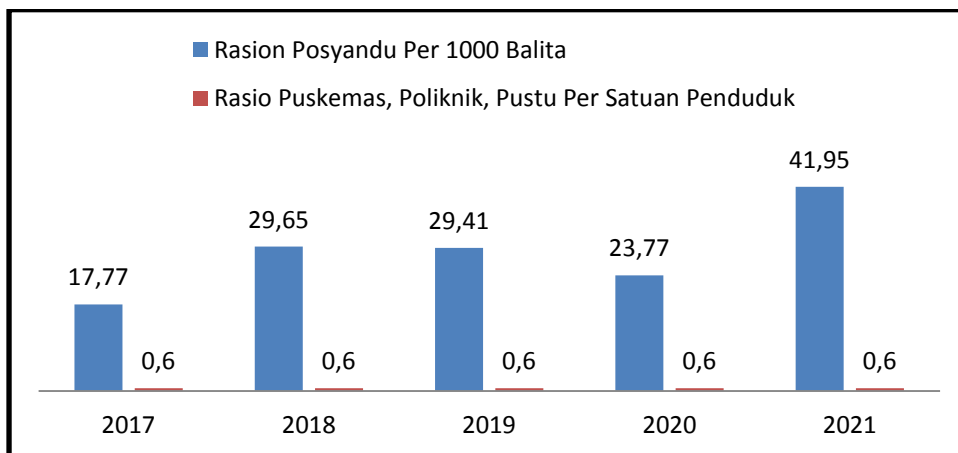


Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan dan tenaga kesehatan pada gambar 2.14 :

Gambar 2.14

Rasio Posyandu, Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Di Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2021



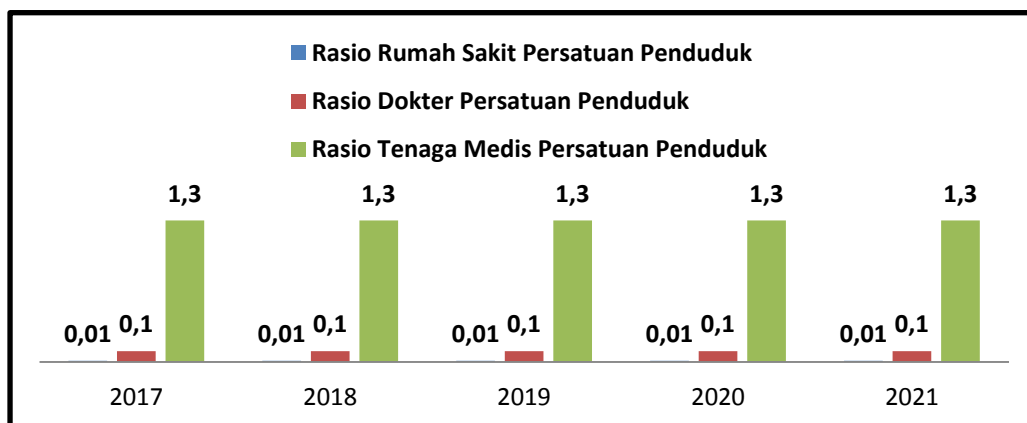
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

Pada tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao masih tetap seperti beberapa tahun sebelumnya yakni sebanyak 12 unit. Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah kerja dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk rata-rata 30.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa dengan jumlah Puskesmas yang ada sudah melebihi ratio standar. Namun jika dilihat dari topografi dan kondisi geografis di Kabupaten Rote Ndao, peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan perlu guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu pada tahun 2020 ada 85 unit. Rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas pada tahun 2020 rata-rata 7,1 : 1, artinya setiap Puskesmas didukung oleh 7 sampai 8 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas operasionalnya Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao didukung juga oleh Puskemas Keliling sebanyak 12 unit, 7 Polindes dan 6 Poskesdes.

Dalam rangka menyukseskan Revolusi KIA di Kabupaten Rote Ndao dikembangkan juga Puskesmas PONED. Terdapat 4 Puskesmas PONED yakni Puskesmas Eahun, Korbafo, Oelaba dan Batutua. Selain itu telah tersedia 12 Pusling yang siap mengantar dan menjemput ibu bersalin dan atau pasien keadaan darurat, berikut rincian gambar 2.15:

Gambar 2.15
Rasio Rumah Sakit, Dokter & Tenaga Medis
Di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 unit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a (RSUD Ba'a) dengan rasio RS terhadap jumlah penduduk 1:143.764 jumlah penduduk. Rumah Sakit ini memiliki kemampuan pelayanan gawat darurat.

Untuk menggambarkan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yaitu dengan menggunakan rasio tempat tidur Rumah Sakit per 100.000 penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan tempat tidur di Rumah Sakit. Pada tahun 2021, rasio tempat tidur per 100.000 penduduk adalah 21,23:100.000 penduduk. Rasio tenaga dokter sebanyak 34 orang per 100,000 penduduk, Rasio tenaga bidan sebanyak 225 orang per 100,000 penduduk, Rasio tenaga perawat sebanyak 192 per 100,000 penduduk.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu wilayah juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di wilayah tersebut. Jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao meliputi data jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya. Jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan se-Kabupaten Rote Ndao tersebar di Dinas Kesehatan sebanyak 40 orang, RSUD Ba'a sebanyak 210 orang, Puskesmas dan jaringannya berjumlah 647 orang. Jumlah tenaga kesehatan di atas termasuk di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Ba'a. Selain itu terdapat 7 dokter PTT, 36 NS, 4 WKDS dan 4 ISIP.

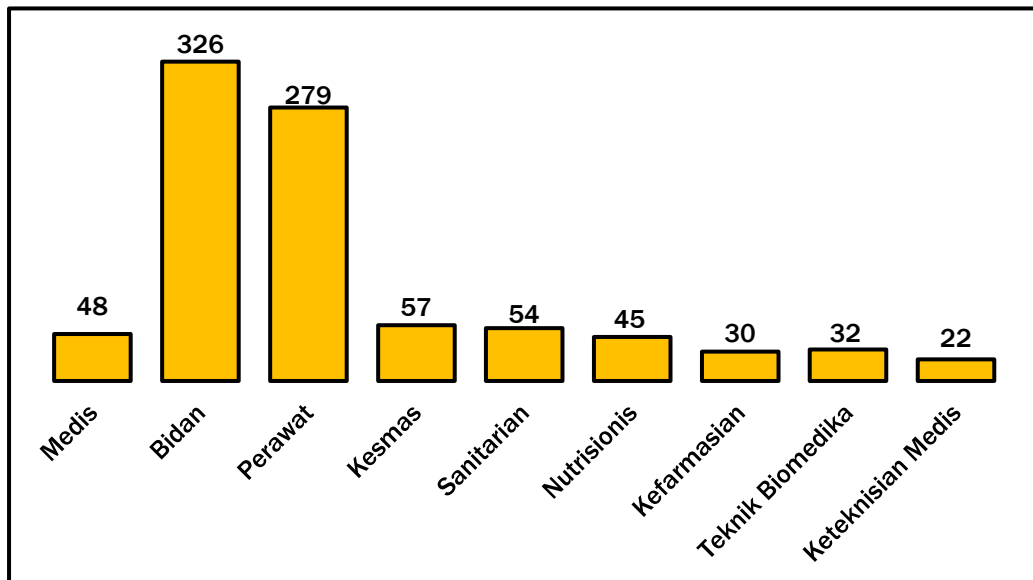
Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan dibutuhkan tenaga kesehatan yang handal. Oleh karena itu, penambahan jumlah dan peningkatan mutu tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Diharapkan pemerintah untuk memprioritaskan ketersediaan tenaga dimaksud mengingat adanya pertumbuhan penduduk dan pemekaran

wilayah, sehingga kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standard dan distribusinya dapat terpenuhi.

Salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan yang bermutu dari segi pendidikan yakni dengan memberikan beasiswa bagi tenaga kesehatan yang belum mencapai tingkat pendidikan sesuai standar secara berkesinambungan.

Pada gambar 2.16 disajikan data jumlah SDM kesehatan di Kabupaten Rote Ndao tahun 2021:

Gambar 2.16
Jumlah SDM Kesehatan Di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2021



Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan;
4. Peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis;

5. Perbaiki sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Rote Ndao termasuk masyarakat miskin.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi;
2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
3. Meningkatkan pelayanan dan sumber daya kesehatan;
4. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatkan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan;
2. Kerjasama lintas sektor dalam penanganan stunting;
3. Meningkatkan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok;
4. Meningkatkan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan;
5. Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat;
6. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis
7. Peningkatan kapasitas institusi kesehatan;
8. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah dengan mengembangkan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang bersifat nasional agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS

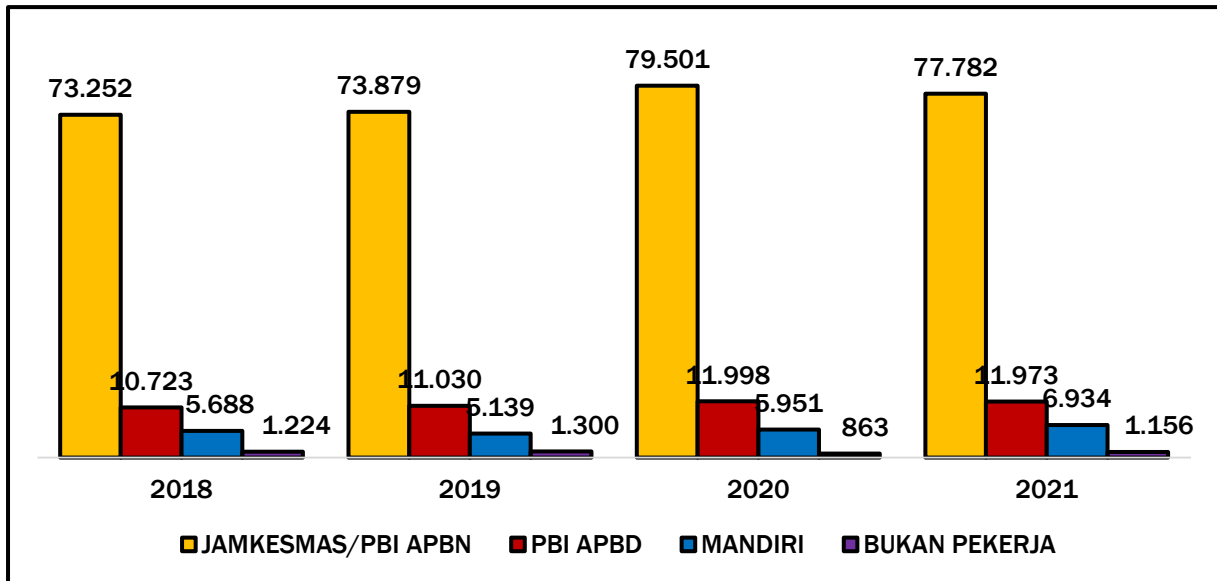
Kesehatan. Kepesertaan JKN dari tahun 2018- 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 sebanyak 102.953 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 73.252 jiwa atau (50,58%), PBI APBD sebanyak 10.723 jiwa atau (7,40%), ASKES PNS/ASN sebanyak 10.867 jiwa atau (7,50%), JPK Jamsostek sebanyak 0 jiwa atau (0%), TNI/POLRI/PNS/ASN POLRI sebanyak 1.199 jiwa atau (0,83%), Mandiri sebanyak 5.688 jiwa atau (3,93%), dan Bukan Pekerja sebanyak 1.224 jiwa atau (0,85%).
2. Tahun 2019 sebanyak 112.231 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 73.879 jiwa atau (51,01%), PBI APBD sebanyak 11.030 jiwa atau (7,62%), ASKES PNS/ASN sebanyak 10.932 jiwa atau (7,62%), JPK Jamsostek sebanyak 0 jiwa atau (0%), TNI/POLRI/PNS/ASN POLRI sebanyak 1.238 jiwa atau (0,85%), Mandiri sebanyak 15,139 jiwa atau (10,45%), dan Bukan Pekerja sebanyak 13 jiwa atau (0,01%).
3. Tahun 2020 sebanyak 112.231 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 79.501 jiwa atau (53,6%), PBI APBD sebanyak 11.998 jiwa atau (8,10%), ASKES PNS/ASN sebanyak 10.878 jiwa atau (7,3%), JPK Jamsostek sebanyak 617 jiwa atau (0,41%), TNI/POLRI/PNS/ASN POLRI sebanyak 1.180 jiwa atau (0,79%), Mandiri sebanyak 5.951 jiwa atau (4,01%), dan Bukan Pekerja sebanyak 863 jiwa atau (0,6%).
4. Tahun 2021 sebanyak 115.188 jiwa yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 77.782 jiwa (54,10%), PBI APBD sebanyak 11.973 jiwa (8,33%), Pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 17.343 jiwa (12,06%), Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri sebanyak 6.934 jiwa (4,82%) dan Bukan pekerja (BP) sebanyak 1.156 jiwa (0,80%).

Untuk selanjutnya dapat di sajikan pada gambar 2.17 berikut ini:

Gambar 2.17

Jenis Layanan JKN Tahun 2018-2021



Sumber Data : BPJS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021

Keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan beberapa indikator terkait yang dapat mendukung meningkatnya kinerja yang dihubungkan dengan pencapaian pembangunan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Indikator derajat kesehatan sebagai hasil akhir, yang terdiri atas indikator mortalitas, morbiditas dan status gizi;
2. Indikator hasil yang terdiri atas indikator keadaan lingkungan, perilaku hidup masyarakat, akses mutu pelayanan kesehatan;
3. Indikator proses dan masukan yang terdiri atas indikator pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait.

Dalam kerangka desentralisasi penugasan di bidang kesehatan, pencapaian pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh pencapaian indikator-indikator tersebut, termasuk situasi derajat kesehatan di daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Daerah

Banyak pakar memberi definisi tentang koordinasi salah satunya Terry dalam (Syafiie, 2009): Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*effort*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objectives*). Sedangkan Koordinasi dalam pemerintahan menurut (Syafudin, 2003) adalah “suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilangsungkan secara horizontal dan vertikal di berbagai sektor termasuk dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Strategi Penanggulangan kemiskinan daerah dijabarkan ke dalam arah kebijakan dengan indikator yang terukur. Selanjutnya arah kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program/kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan pendidikan, ketenagakerjaan, peningkatan dan pelayanan kesehatan, peternakan, pertanian, perikanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten dan Kota, khususnya pada pasal 11 yang mengatur Tugas dan fungsi TKPKD Kabupaten.

TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
- 2) Pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
- 3) Pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- 4) Pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan
- 5) Pengkoordinasian terhadap evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

TKPK Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian, Pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Koordinasi program – program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini merupakan tugas dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao. Dikukuhkan dengan Keputusan

Bupati Rote Ndao Nomor 276/KEP/HK/Tahun 2021, tim ini terdiri dari unsur aparatur OPD yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan, Masyarakat dan unsur organisasi sosial kemasyarakatan.

Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Penanggung Jawab : Bupati Rote Ndao
2. Ketua : Wakil Bupati Rote Ndao
3. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao
4. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum
5. Sekretaris : Kepala Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao
6. Wakil Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao
7. Wakil Sekretaris II : Kepala DPMD Kabupaten Rote Ndao
8. Wakil Sekretaris III : Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Rote Ndao

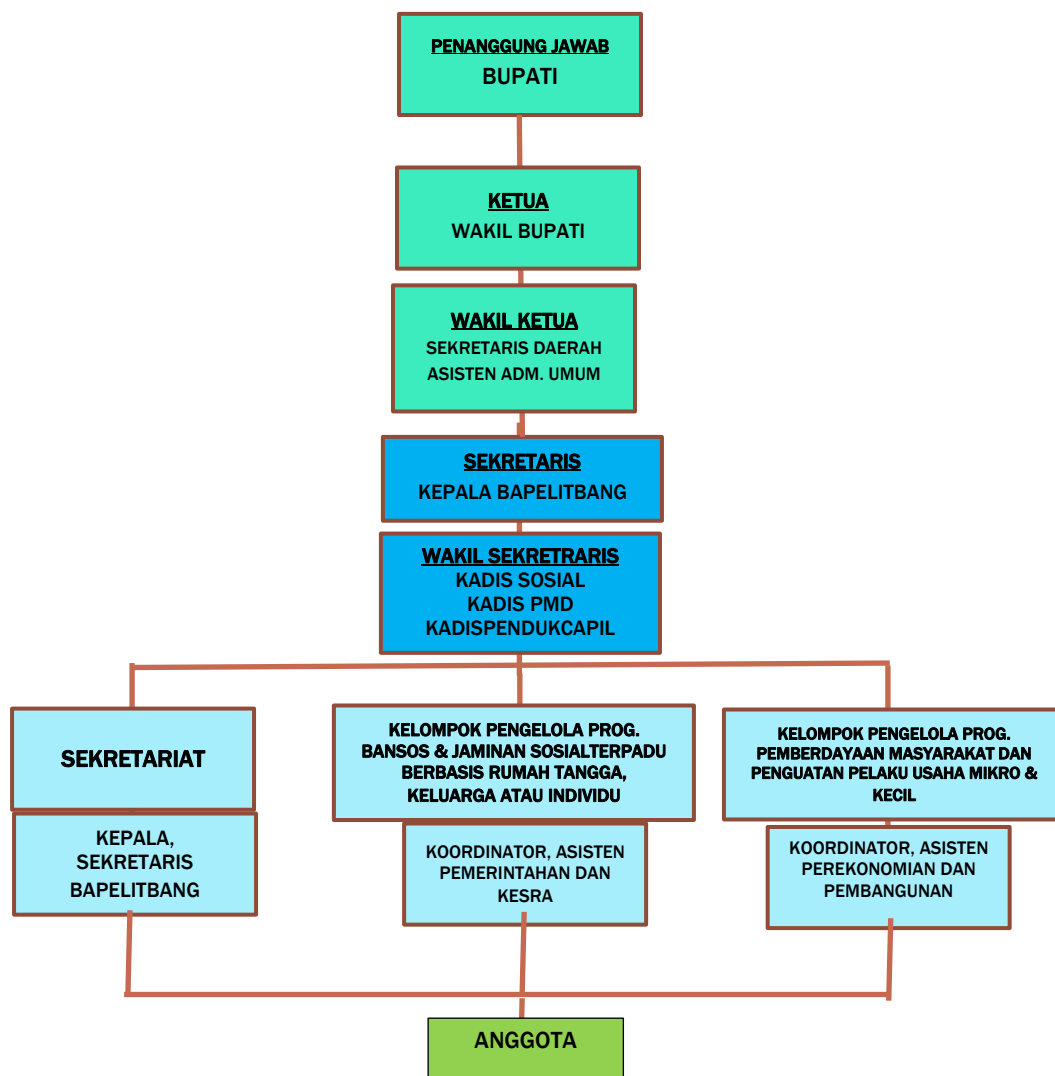
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Program sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Kelompok Pengelola Program
 - a) Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Atau Individu.
 - b) Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Rote Ndao disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Rote Ndao



TKPKD Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2022 tidak melaksanakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Rote Ndao dikarenakan Pandemi Covid-19 dimana dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan dampak akibat pandemi tersebut. Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan terutama berkaitan dengan validasi data kemiskinan, baik program Penanggulangan Kemiskinan di Desil I yaitu program perlindungan sosial (Rastra, PKH, Jamkesmas/Jamkesda, dan program lainnya) Program

Desil II, yaitu Program Pemberdayaan (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan KB, LAKAMOLA ANANSIO dll) serta Program Pro Rakyat Lainnya seperti Bantuan Perumahan (ALADIN), Bantuan Ternak dan Pemberdayaan Koperasi-UMKM untuk masyarakat pada desil III dan IV.

3.2 Koordinasi Kelembagaan di Tingkat Provinsi dan Pusat

Pelaksanaan koordinasi antar lembaga ditingkat Provinsi dan Pusat juga telah dilakukan melalui:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional;
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi;
3. Koordinasi dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Koordinasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi;
5. Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga tingkat Pusat;
6. Rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Nasional;
7. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem tingkat Provinsi dan Nasional;
8. Asistensi Teknis Untuk penguatan kapasitas daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

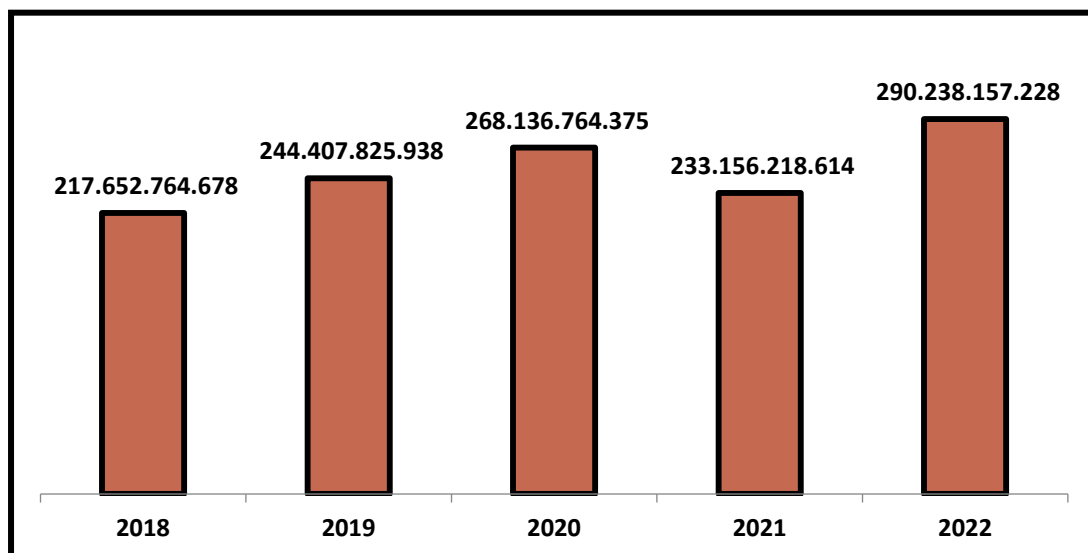
3.3 Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018-2022

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian target kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai prioritas merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Perubahan Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024 serta RKPD tahun 2022 yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif, dari setiap anggaran yang disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat dana sesuai dengan prioritas dan target yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, salah satunya anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang secara tidak langsung di arahkan kepada beberapa OPD yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan kemiskinan yang ada di Kabupaten Rote Ndao. Pada gambar 3.2 disajikan anggaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022 :

Gambar 3.2
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab. Rote Ndao
Tahun 2018-2022



Sumber Data: BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Gambar 3.1 diatas Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp.233.156.218.614 mengalami peningkatan sebesar Rp.57.081.938.614 pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.290.238.157.228. Berikut rincian tabel Perangkat Daerah yang mengelola anggaran penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran dari tahun 2021-2022 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1. dibawah ini.

Tabel 3.1.
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kab. Rote Ndao
Tahun 2021-2022

No	OPD	2021	2022	Bertambah / Berkurang
1	Dinas PKO	49.444.010.500	60.380.241.773	10.936.231.273
2	Dinas Kesehatan	71.868.353.724	87.455.194.801	15.586.841.077
3	Dinas PUPR	60.560.851.070	89.401.974.000	28.841.122.930
4	Dinas PKPLH	13.852.070.708	13.169.465.700	-682.605.008
5	Dinas Sosial	1.122.629.600	1.316.000.000	193.370.400
6	BPBD	349.998.400	2.219.102.300	1.869.103.900
7	Dinas Transnaker	354.999.420	160.000.000	-194.999.420
8	Dinas P3AP2KB	3.817.250.600	3.142.426.354	-674.824.246
9	Dinas Pangan	300.000.000	420.603.900	120.603.900
10	Dinas MPD	1.065.000.000	1.068.034.100	3.034.100
11	Dinas Koperindag	740.000.000	902.892.300	162.892.300
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	844.854.200	854.833.600	9.979.400
13	Dinas Perikanan	12.364.964.000	4.557.291.400	-7.807.672.600
14	Dinas Pertanian	7.155.000.000	11.793.958.300	4.638.958.300

No	OPD	2021	2022	Bertambah / Berkurang
15	Dinas Peternakan	1.364.000.000	6.000.357.500	-1.078.656.620
16	Bagian Ekbang & SDA	2.681.991.820	1.603.335.200	-1.078.656.620
17	Kecamatan Lobalain	2.264.096.600	2.264.096.600	0
18	Kecamatan Rote Barat Laut	754.554.500	887.938.600	133.384.100
19	Kecamatan Rote Tengah	754.554.500	865.995.000	111.440.500
20	Kecamatan Pantai Baru	742.335.000	885.362.200	143.027.200
21	Kecamatan Rote Timur	754.703.972	889.053.600	134.349.628
	JUMLAH	233.156.218.614	290.238.157.228	57.081.938.614

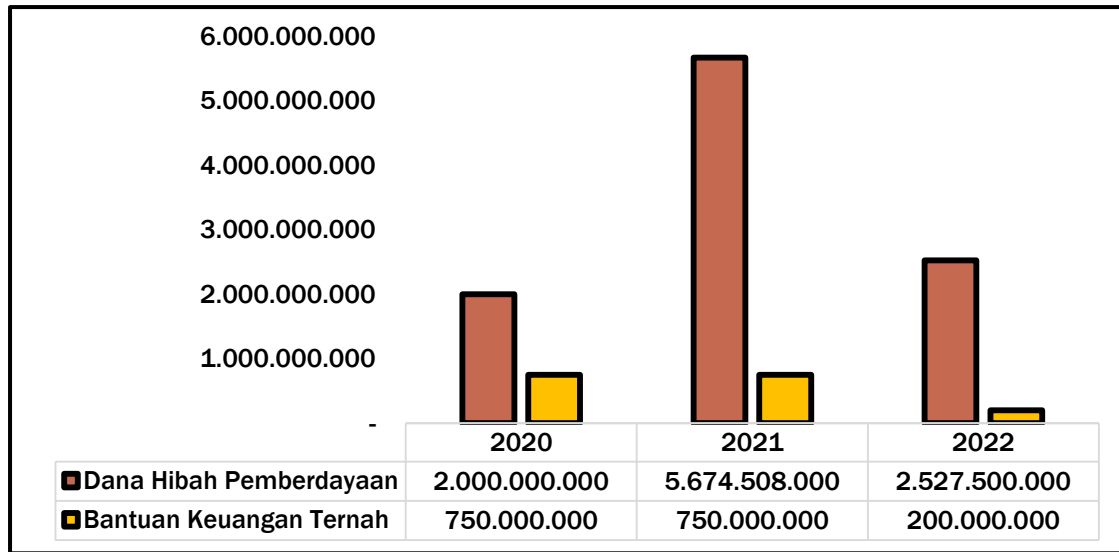
Sumber Data: BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2022

Penurunan alokasi anggaran pada OPD pengelola program penanggulangan kemiskinan yang cukup signifikan ini Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao karena bantuan pemerintah hanya merupakan stimulant bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan ekonominya. Fokus Pemerintah Daerah dengan anggaran yang terbatas terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin pada pemenuhan standar pelayanan minimal.

Alokasi pembiayaan penanggulangan kemiskinan belum menempatkan pembiayaan yang optimal, hal ini dapat dilihat dari distribusi pembiayaan yang belum mencerminkan proporsi yang sesuai dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Anggaran penanggulangan kemiskinan melalui dana hibah pemberdayaan dan bantuan keuangan disajikan pada gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3
 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah, Bankeu Ternak & Subsidi Tahun 2020-2022



Sumber Data: BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2022

Alokasi anggaran kemiskinan pada OPD dijabarkan sebagai berikut:

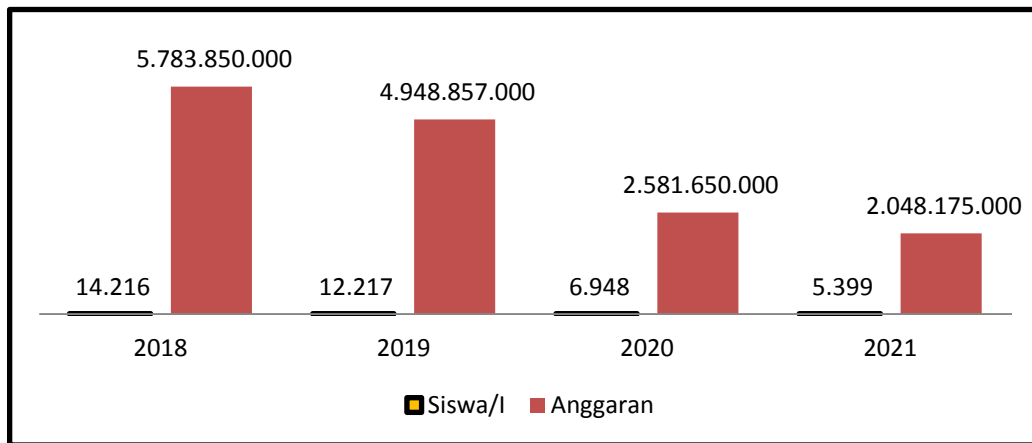
3.3.1 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi kelompok masyarakat miskin antara lain adalah di bidang pelayanan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mampu menikmati pelayanan pendidikan yang wajar sehingga mereka mampu menjadi insan yang berguna dan tidak mewariskan kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka.

Dinas PKO merupakan salah satu OPD yang berperan penting dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Melalui peninjauan dan target-target yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dalam meminimalisir jumlah anak putus sekolah, meningkatkan jumlah angka melek huruf pada masyarakat terutama pada anak usia sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan anak usia sekolah. Untuk mewujudkan semua target tersebut Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao.

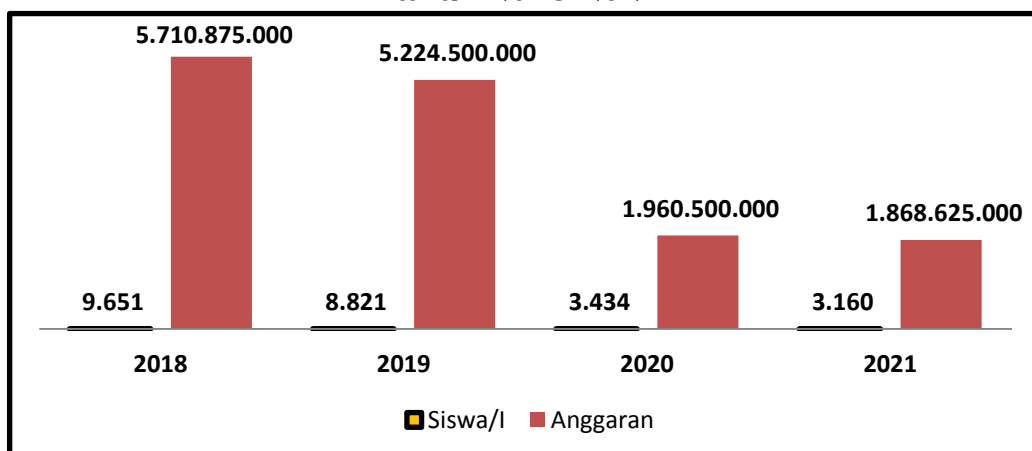
Alokasi anggaran dari waktu ke waktu terus meningkat. Kewajiban dari Undang-Undang untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggaran belanja mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah pusat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan adalah salah satunya dengan mengimplementasikan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui bantuan beasiswa bagi siswa-siswi di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Rote Ndao dapat disajikan dalam gambar 3.4 & 3.5 berikut ini:

Gambar 3.4
Program PIP SD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021



Sumber Data : Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021

Gambar 3.5
Anggaran Program PIP SMP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021



Sumber Data : Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021

Di Kabupaten Rote Ndao, anggaran bidang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan kinerja indikator pendidikan secara umum. Misalnya pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), kenaikan anggaran terlihat berkorelasi hanya pada capaian di tingkat APK SD dan APK SMP, sementara APK pada jenjang SMA tidak bergerak naik bahkan cenderung turun.

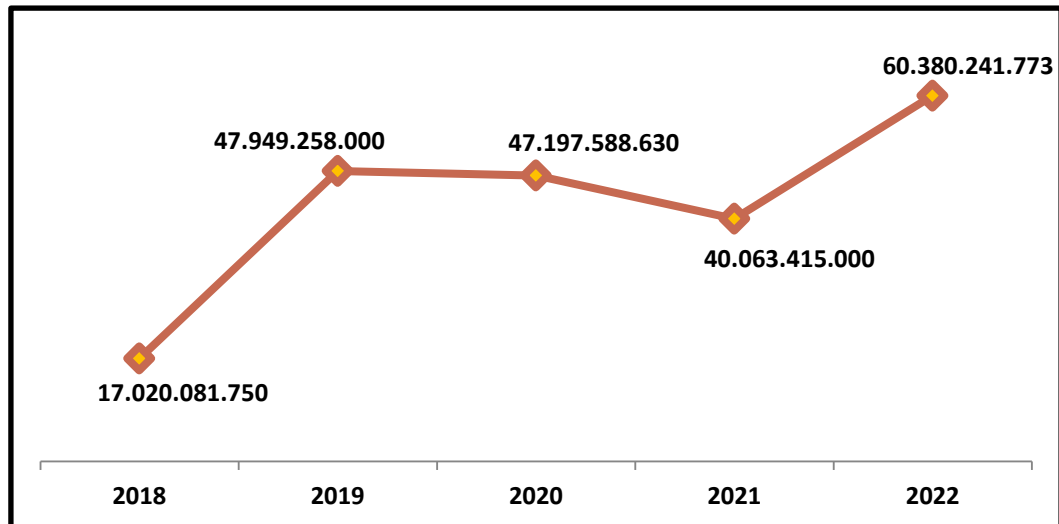
Pola yang sama terlihat juga pada capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM, SD dan SMP meningkat seiring bertambahnya alokasi anggaran pendidikan. Sementara itu untuk APM pada level SMA tidak terlihat berkorelasi dengan kenaikan anggaran tersebut.

Peningkatan akses pelayanan dasar yang terpenting bagi kelompok masyarakat miskin antara lain adalah di bidang pelayanan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin diharapkan mampu menikmati pelayanan pendidikan yang wajar sehingga mereka mampu menjadi insan yang berguna dan tidak mewariskan kemiskinan sebagaimana yang dialami oleh orang tua mereka.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga adalah salah satu OPD yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Melalui peninjauan dan target-target yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam meminimalisir jumlah anak putus sekolah, meningkatkan jumlah angka melek huruf pada masyarakat terutama pada anak usia sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di kalangan anak usia sekolah. Untuk mewujudkan semua target tersebut Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao.

Jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada dinas pendidikan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang pendidikan sebagaimana disajikan pada Gambar 3.6 berikut :

Gambar 3.6
Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao
Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas PKO
Tahun 2018-2022



Sumber Data: BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 sebesar Rp.17.020.081.750,- kemudian naik pada tahun 2019 sebesar Rp.47.949.258.000,- pada tahun 2020 anggaran penanggulangan kemiskinan pada Dinas PKO menurun menjadi Rp.47.197.588.630 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp.40.063.415.000,- Penurunan ini disebabkan oleh situasi *force majeure* yaitu pandemi COVID-19 di mana sebagian besar anggaran mengalami *refocusing* untuk penanganan bencana non-alam COVID-19. Pada tahun 2022 anggaran kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.60.380.241.773,-.

Sejumlah program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk menanggulangi kemiskinan antara lain :

- Program pendidikan anak usia dini dengan kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah, Rehabilitasi ruang belajar, Penyelenggaraan PAUD, Lomba olahraga, senam dan kreatifitas anak & guru TK, Pelatihan pembuatan APE bahan lokal untuk PAUD;

- Program wajib belajar dasar Sembilan tahun dengan kegiatan Penyelenggaraan Paket B setara SMP, Penyelenggaraan UAN dan UAS, Penyediaan BOS;
- Program pendidikan menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan paket C setara SMU, Penyelenggaraan UAN dan UAS;
- Program pendidikan non formal dengan kegiatan Pengembangan pendidikan keaksaraan;
- Program pendidikan luar biasa dengan kegiatan Penyediaan dana operasional sekolah untuk SLB.

3.3.2 Dinas Kesehatan

Selain pendidikan, pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin adalah pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang baik, dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Kondisi tersebut akan memungkinkan mereka memperoleh penghasilan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan.

Bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan kesehatan itu menjadi sangat mahal, untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Kesehatan memiliki beberapa program untuk meringankan beban masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Rote Ndao dengan memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Prioritas target Indikator utama yang digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di bidang kesehatan adalah : (1) Angka Kematian Bayi (2) Angka Kematian Ibu Melahirkan (3) Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting. Keempat indikator utama ini menggambarkan capaian (*outcome*) pembangunan di bidang kesehatan dan mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh program pembangunan daerah dan nasional.

Selain dari memberikan pengobatan gratis pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Kesehatan juga memiliki target untuk mengurangi angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan serta angka gizi buruk pada anak dan angka anak stunting untuk itu

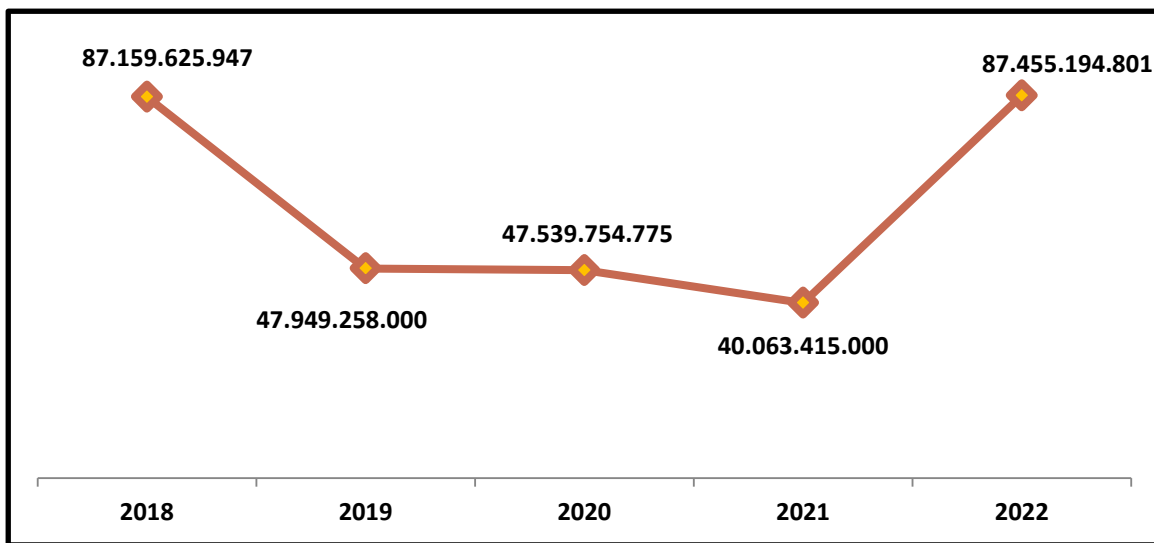
anggaran untuk Kesehatan di Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui anggaran pada OPD Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan dengan kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan , Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit;
2. Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat, Bantuan operasional kesehatan, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat;
4. Program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan Penanggulangan kurang energy protein (KEP), Anemia gizi besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang vitamin A, dan Kekurangan zat gizi mikro lainnya;
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Peningkatan *surveillance* epidemiologi dan penanggulangan wabah dan Pengendalian penyakit menular;
6. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedik, Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan;
7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan kegiatan Pertolongan persalinan dan Jaminan persalinan;
8. Program Jamkesda untuk masyarakat miskin;
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
10. Program pengadaan peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru,/rumah sakit mata;

11. Program pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru,/rumah sakit mata;
12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana & prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

Gambar 3.7
Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan
Kemiskinan Dinas Kesehatan
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa alokasi anggaran kemiskinan untuk Dinas Kesehatan pada tahun 2018 sebesar Rp.87.159.625.947,- mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi Rp.47.949.258.000,- dan berkurang menjadi Rp.47.539.754.775- pada tahun 2020. Pada tahun 2021 anggaran Dinas Kesehatan mengalami penurunan sebesar Rp.40.063.415.000,- Penurunan pada dua tahun terakhir disebabkan oleh kondisi *force majeure* yaitu pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar anggaran mengalami *refocusing* untuk penanganan bencana non-alam COVID-19. Pada tahun 2022 anggaran bidang kesehatan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 87.455.194.801.

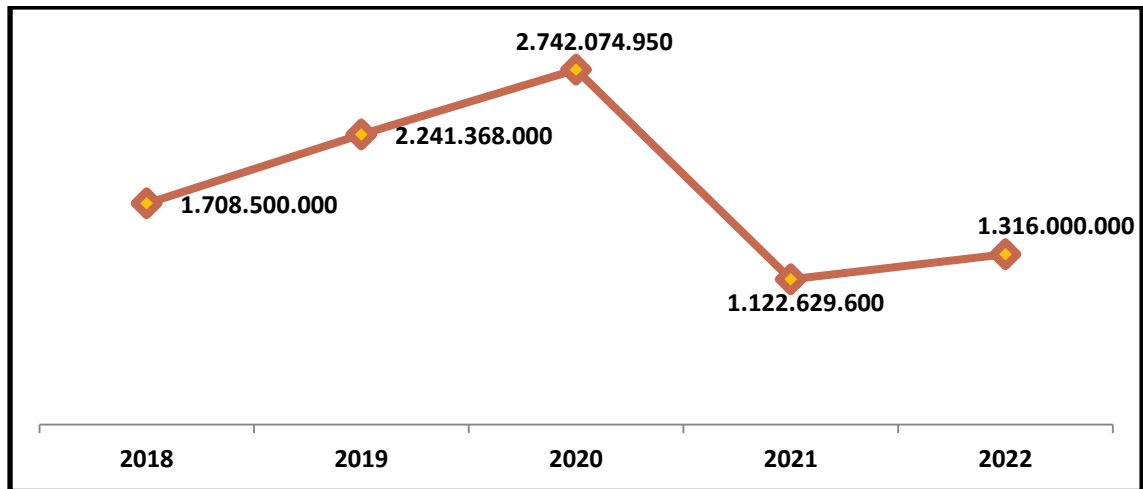
3.3.3 Dinas Sosial

Dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao, maka Dinas Sosial melakukan fungsi melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan pembangunan urusan sosial diarahkan pada pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pembinaan anak terlantar, Panti asuhan/panti jompo, penyandang cacat dan eks trauma, eks penyandang penyakit sosial dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Rote Ndao.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Sosial mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao seperti pada gambar 3.8 berikut :

Gambar 3.8
Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao
Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Dari gambar diatas dapat di ketahui bahwa komposisi anggaran untuk Dinas Sosial mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021. Kenaikan anggaran pada OPD ini tentu saja untuk membiayai berbagai program/kegiatan perkantoran termasuk program/kegiatan yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya dengan kegiatan Pembinaan lanjutan dan pertumbuhan KUBE fakir miskin serta KAT;
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga harapan dan Bantuan logistik, perlindungan dan jaminan sosial bagi lansia terlantar;

3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma dengan kegiatan Bantuan logistik bagi murid SLB dan koordinasi penyantunan penyandang disabilitas luar panti.

Sedangkan penurunan anggaran pada tahun 2021 disebabkan oleh kondisi *force majeure* yaitu pandemic COVID-19 sehingga menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran pada berbagai perangkat daerah termasuk Dinas Sosial untuk penanganan bencana sosial non-alam COVID-19, kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.316.000.000.

3.3.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB diarahkan pada program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Capaian layanan administrasi urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai tahun 2021 dengan indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 4,11 persen, Partisipasi angkatan kerja perempuan 61,99 persen, rasio KDRT sebesar 0,008 persen, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan tindakan kekerasan sebesar 91,20%.

Pada urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada upaya pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS, program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, program penyiapan

tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU.

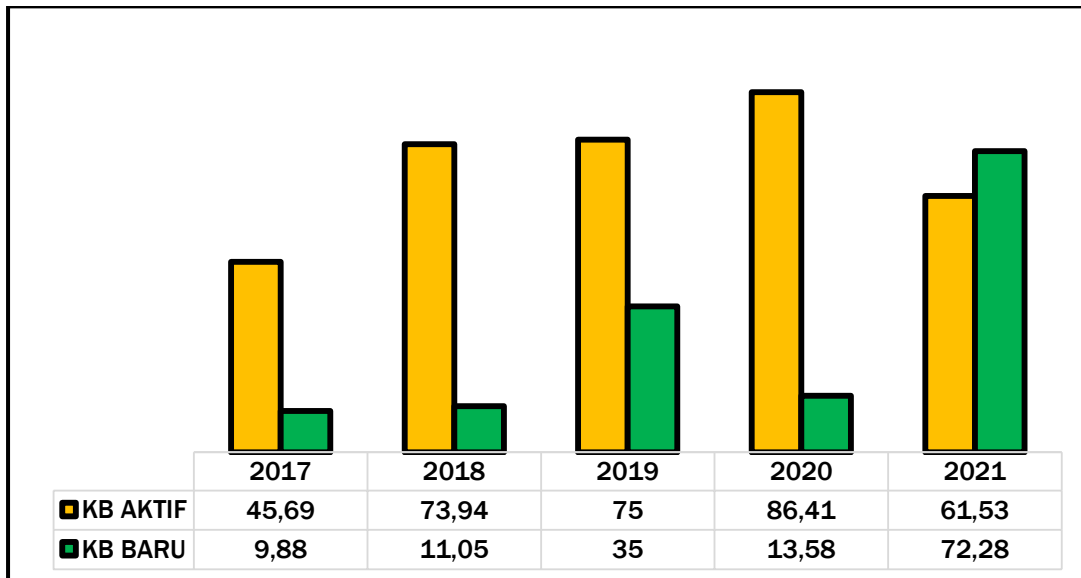
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk melakukan fungsi melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah:

1. Kegiatan Pelayanan konseling KB;
2. Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha;
3. Kegiatan Sosialisasi tumbuh kembang anak, KIE, KRR bagi remaja;
4. Kegiatan Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan;
5. Kegiatan Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di kampung KB;
6. Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Peningkatan kualitas anak dan perlindungan hak anak.

Indikator keberhasilan program KB diukur dengan peserta KB aktif. Peserta KB aktif adalah akseptor baru dan lama yang pada saat ini memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan pasangan usia subur (PUS) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara PUS.

Persentase pelayanan KB baru dan KB aktif dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini:

Gambar 3.9
 Persentase Pelayanan KB Baru dan KB Aktif
 di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 – 2021

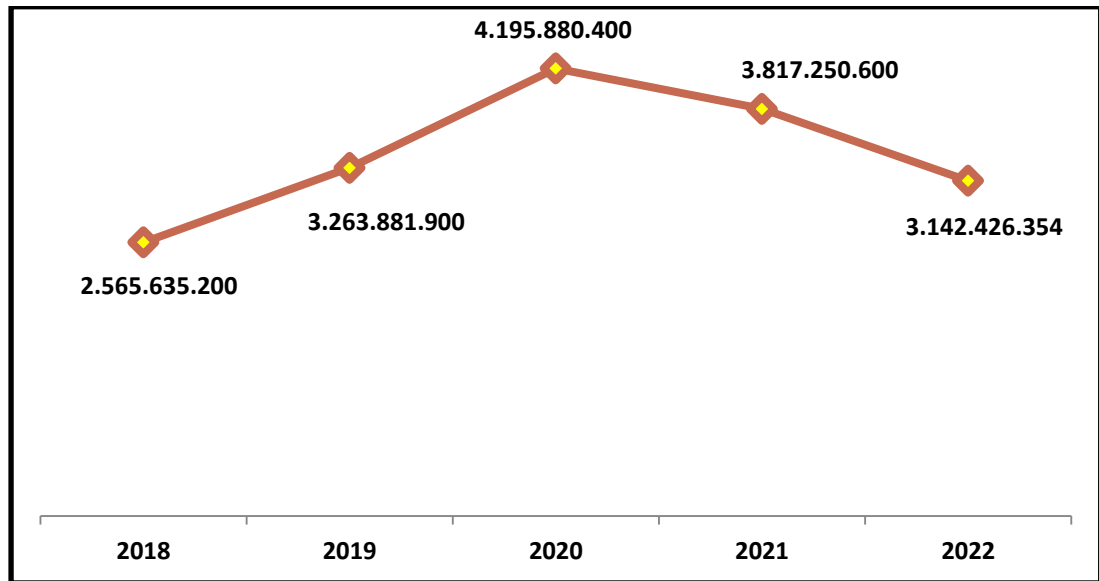


Sumber Data : Dinas P3AP2KB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2021

Gambar tersebut menunjukkan bahwa cakupan pelayanan KB Baru maupun KB Aktif trendnya cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Cakupan KB Aktif pada tahun 2017 mencapai 45,69 persen. Meningkat pada tahun 2018 sebesar 73,94 persen, pada tahun 2019 sebesar 75 persen dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 86,41 persen, tapi pada tahun 2021 menurun menjadi 61,53 persen. Sedangkan persentase KB baru pada tahun 2017, 2018 dan 2019 secara berturut-turut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 menurun sebesar 13,58 persen, tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 72,28 persen. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut maka pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyiapkan sejumlah anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao seperti tertera pada gambar 3.10 berikut :

Gambar 3.10

Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao adalah dengan memberikan layanan administrasi urusan kependudukan dan catatan sipil yang menyentuh seluruh komponen masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil serta mewujudkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu/e-KTP. Berikut disajikan perkembangan capaian pelayanan kependudukan dan catatan sipil tahun 2021 di Kabupaten Rote Ndao pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021

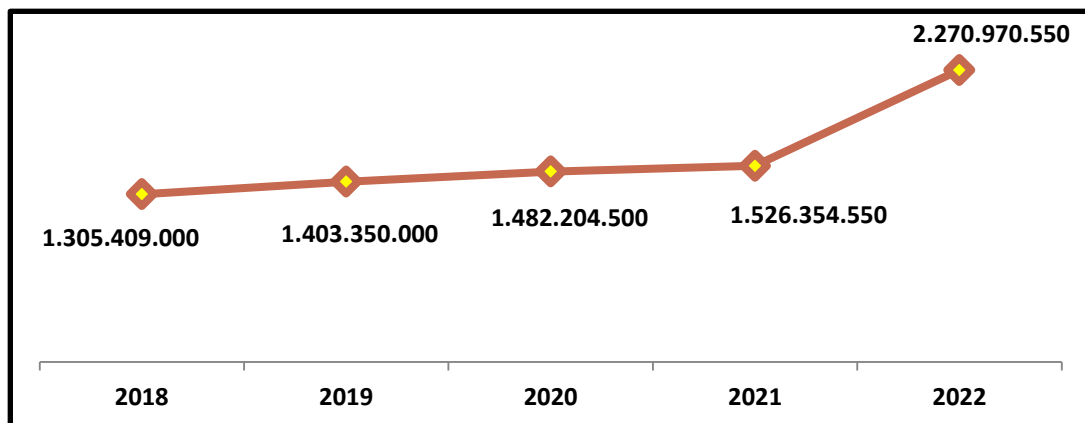
NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Rasio Penduduk ber KTP (%)	90,90
2.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (%)	100
3.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	48,03
4.	Cakupan penerbitan KTP	90,90
5.	Cakupan penerbitan akte kelahiran	78,55

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao Tahun 2021

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa kesadaran msyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan semakin baik. Peningkatan pelayan kependudukan lebih ditingkat dengan cara Pendekatan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparat pengelola administrasi kependudukan.

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao maka pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kegiatan pada OPD Dinas Kependudukan dan Catatan sipil sebagaimana tergambar pada gambar 3.11 berikut :

Gambar 3.11
Alokasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.6 Dinas Pertanian

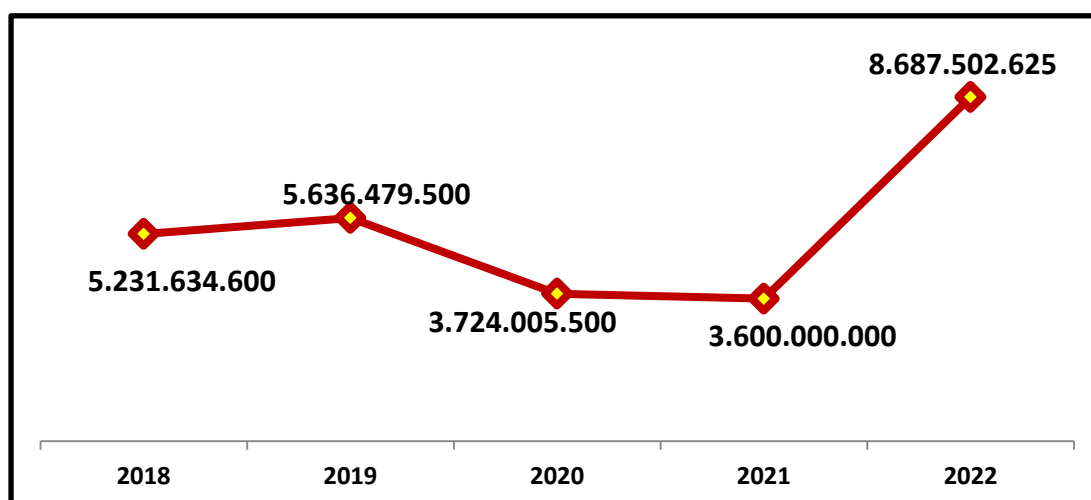
Dinas Pertanian memiliki andil yang cukup besar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao yaitu dengan intervensi program dan kegiatan melalui penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta penyuluhan pertanian, sehingga memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan produksi pertanian. Hal ini secara langsung mendukung ketahanan pangan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani, karena persentase penduduk miskin Rote Ndao tahun 2022 yang berkerja di sektor pertanian sebesar 52,92 persen.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki satu program prioritas khusus di bidang pertanian yaitu “**Gerakan Lakamola Anansio**” dengan sasarannya adalah terwujudnya pembukaan lahan baru, meningkatkan kemampuan ekonomi sesuai dengan basis keunggulan komoditi lokal, penurunan kemiskinan, peningkatan ketersediaan pangan lokal, tersedianya keragaman pangan dan penyediaan pupuk bersubsidi sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan produksi pertanian, peningkatan ketahanan pangan dan pencapaian surplus beras. Atas dasar program yang inovatif ini maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu dalam top 40 (empat puluh) inovasi pelayanan publik tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB.

Adapun alokasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pertanian di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022 dijabarkan pada gambar 3.12 di bawah ini :

Gambar 3.12

Alokasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Dinas Pertanian Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kab Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.7 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

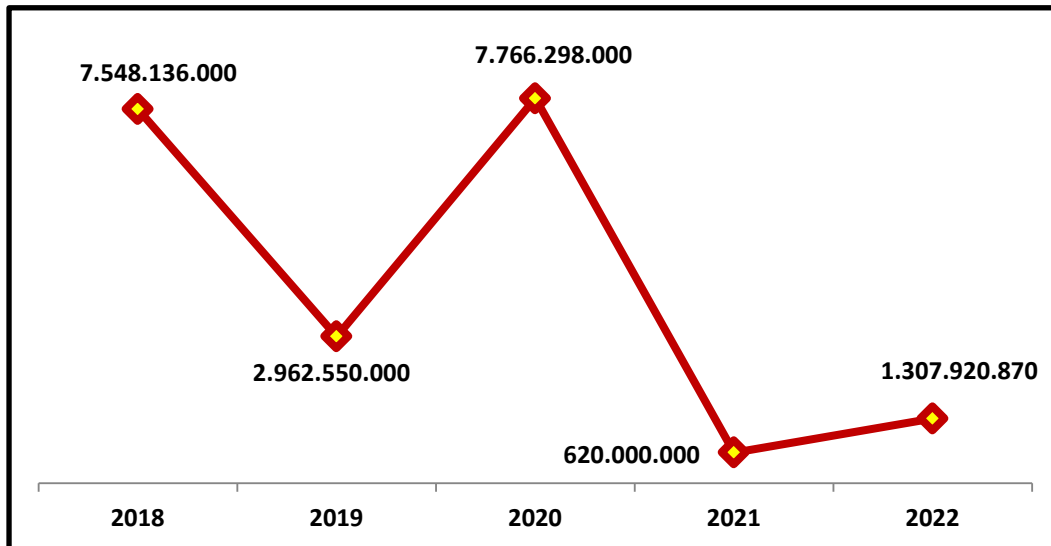
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu perangkat daerah yang fokus pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan terkait koperasi, pengembangan IKM serta perdagangan.

Penduduk miskin penerima manfaat program pemberdayaan dan bantuan usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil, Industri Kecil dan Menengah dan perdagangan sehingga bisa meningkatkan pendapatan yang berimplikasi pada perbaikan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao sebagaimana pada gambar 3.13 berikut :

Gambar 3.13

Alokasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

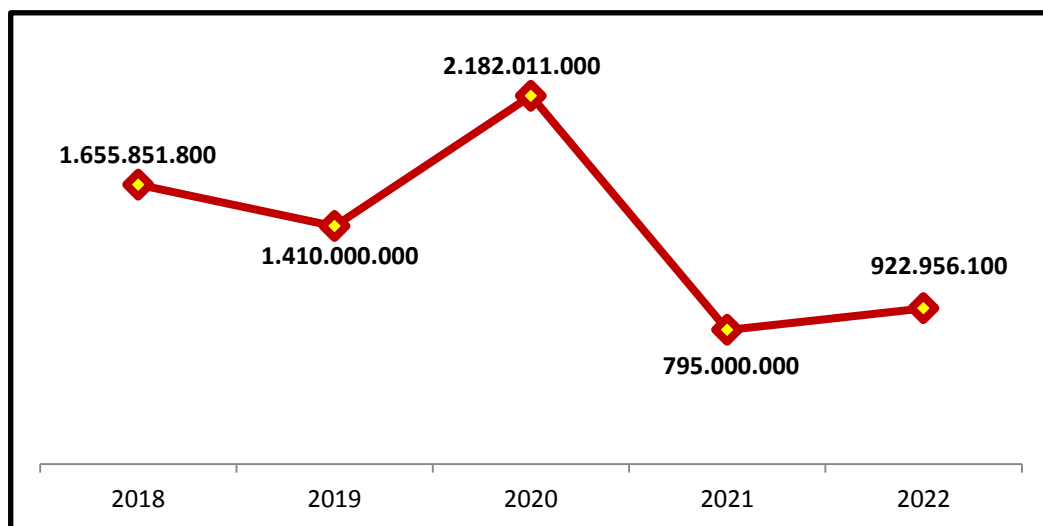
3.3.8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi anggaran Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao difokuskan pada program penataan dan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Sedangkan melalui alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana prasarana infrastruktur di desa, meningkatkan ketahanan pangan serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, meningkatkan pendapatan dan membuka konektivitas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan anggaran pada tahun 2022, diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat miskin, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan membuka konektivitas bagi arus barang dan jasa.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga menjadi salah satu pilar penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Saat ini Bumdes aktif di Kabupaten Rote Ndao berjumlah 18 Bumdes yang tersebar di 11 Kecamatan, masih terdapat 97 Bumdes yang statusnya tidak aktif, diharapkan Bumdes-Bumdes ini bisa menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di desa. Alokasi anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti Pada Gambar 3.14 berikut :

Gambar 3.14
Alokasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2018-2022



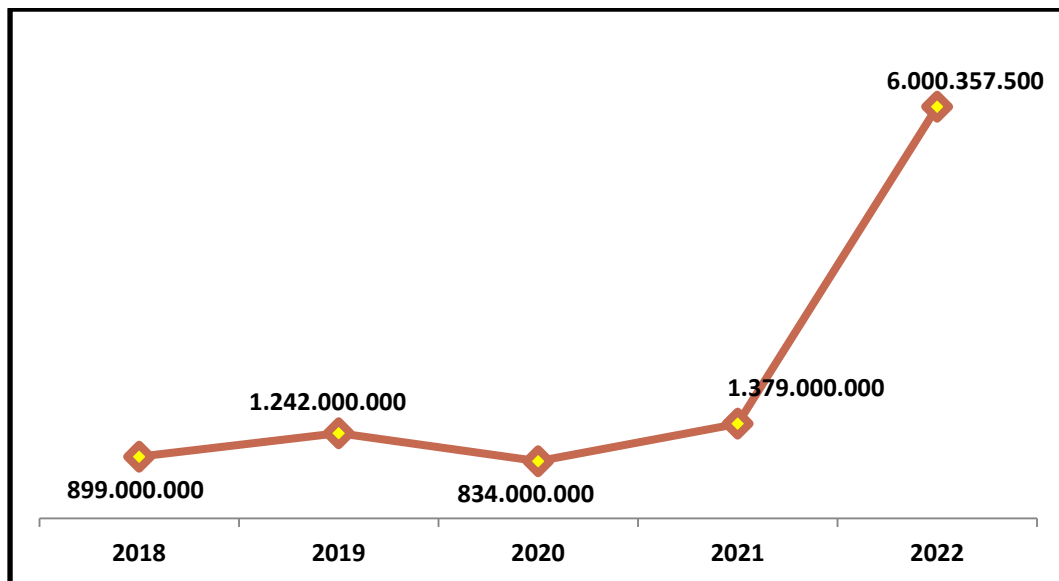
Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.9 Dinas Peternakan

Program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat miskin dengan mengembangkan potensi dibidang peternakan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan bibit ternak sapi dan ternak lainnya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dikembangkan. Masyarakat diharuskan untuk

membentuk kelompok peternakan dan bantuan ini diserahkan kepada kelompok yang telah dibentuk tersebut sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ternak dengan alokasi anggaran seperti pada Gambar 3.15 berikut:

Gambar 3.15
Alokasi APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Untuk Dinas Peternakan Tahun 2018-2022



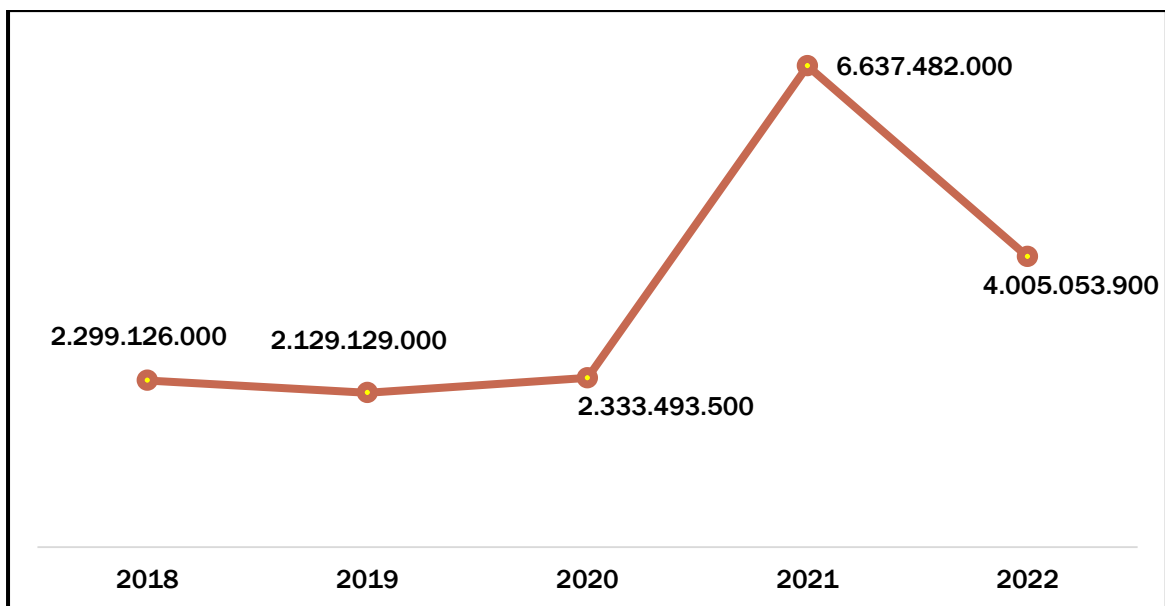
Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.10 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Rote Ndao memiliki beragam jenis kekayaan laut yang sangat potensial dan berlimpah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Perikanan wajib memberikan dukungan dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana serta pemberdayaan kepada seluruh nelayan agar dapat memanfaatkan secara maksimal potensi perikanan laut dan perikanan budidaya sehingga produksi hasil ikan dapat terus meningkat dan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan. Sektor perikanan di Kabupaten Rote Ndao juga mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT yaitu melalui pembudidayaan Ikan Kerapu di kawasan Mulut Seribu Desa Daiama Kecamatan Landuleko dimana itu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pada Tahun 2021 dikembangkan Pembudidayanya dengan Sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Disamping itu melalui alokasi dana pemberdayaan kepada masyarakat di pesisir pantai, pemberian bantuan kapal serta pemberian bantuan sarana prasarana penangkapan ikan serta sarana budidaya rumput laut merupakan langkah terobosan yang cepat dan tepat sasaran kepada penerima bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao. Dampak Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penyediaan Sarana prasarana yang akan diberikan kepada masyarakat karena mengalami *refocusing* anggaran sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan anggaran agar program-program penanggulangan kemiskinan pada Tahun 2022 mengalami penurunan seperti Pada Gambar 3.16 berikut :

Gambar 3.16
Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2021



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2021

3.3.11 Dinas Ketahanan Pangan

Pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Petani

memiliki kedudukan strategis dari aspek ketahanan pangan karena petani adalah produsen pangan dan petani juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan rentan miskin sehingga membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah peranan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan petani.

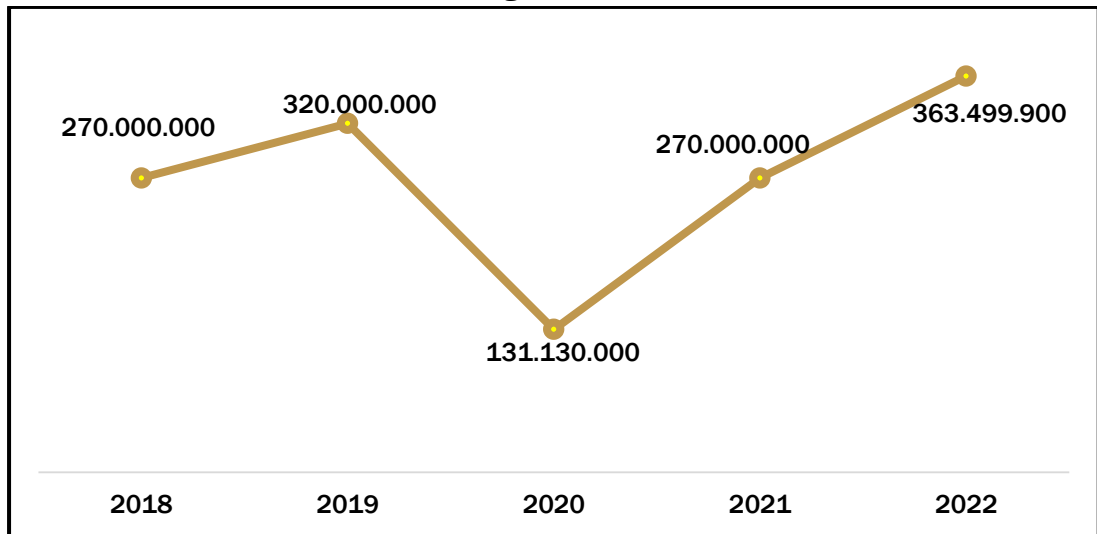
Menjadi kewajiban pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, pemerintah telah menetapkan beberapa upaya untuk mengurangi kerawanan/kerentanan pangan antara lain dengan cara:

1. Membangun infrastruktur agar terjalin integrasi antara sumber pasokan bahan pangan dan distribusinya dengan mengembangkan sentra-sentra produksi dan daerah-daerah lumbung pangan baru;
2. Membangun partisipasi masyarakat dalam mengembangkan cadangan pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tersebut;
3. Membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas konsumsi melalui penganekaragaman dan diversifikasi konsumsi pangan;
4. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mencanangkan Program Lakamola Anan Sio yaitu untuk mengatasi rawan pangan dan menjadi gerakan moral serta dengan spirit mempertahankan budaya gotong royong, yang ditanamkan para leluhur.

Keseluruhan program dilaksanakan dengan alokasi anggaran seperti disajikan Pada Gambar 3.17 berikut :

Gambar 3.17

Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022



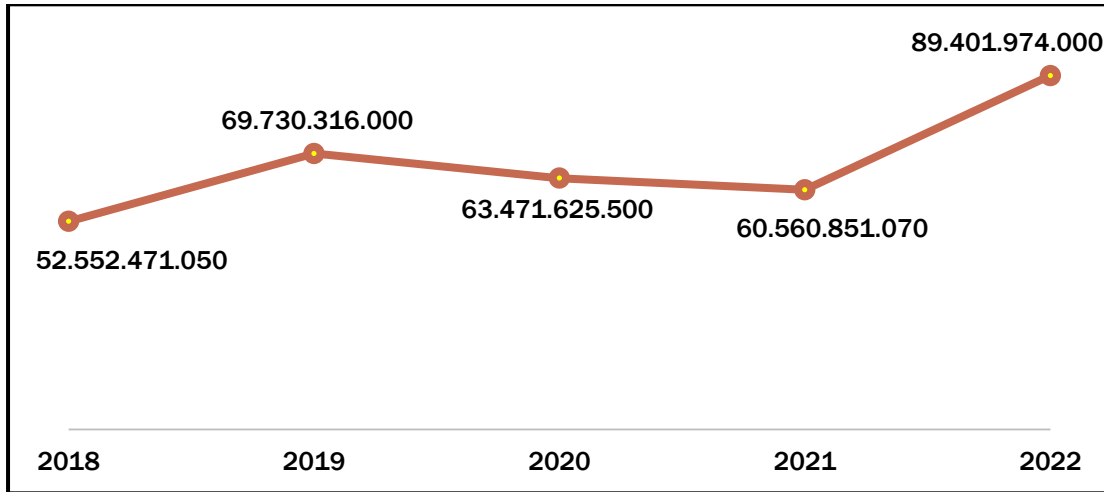
Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih di fokuskan pada penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan untuk dapat membuka akses ke daerah-daerah terisolir sehingga berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat yang berada di wilayah pelosok, selain itu pembangunan embung juga dapat mengurangi angka kemiskinan lewat penyediaan air untuk lahan pertanian, yang selama ini hanya bercocok tanam satu kali dalam setahun menjadi 2-3 kali dalam setahun. Pelayanan dasar untuk kebutuhan air bersih, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dengan alokasi Anggaran seperti Pada Gambar 3.18 berikut :

Gambar 3.18

Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.3.13 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

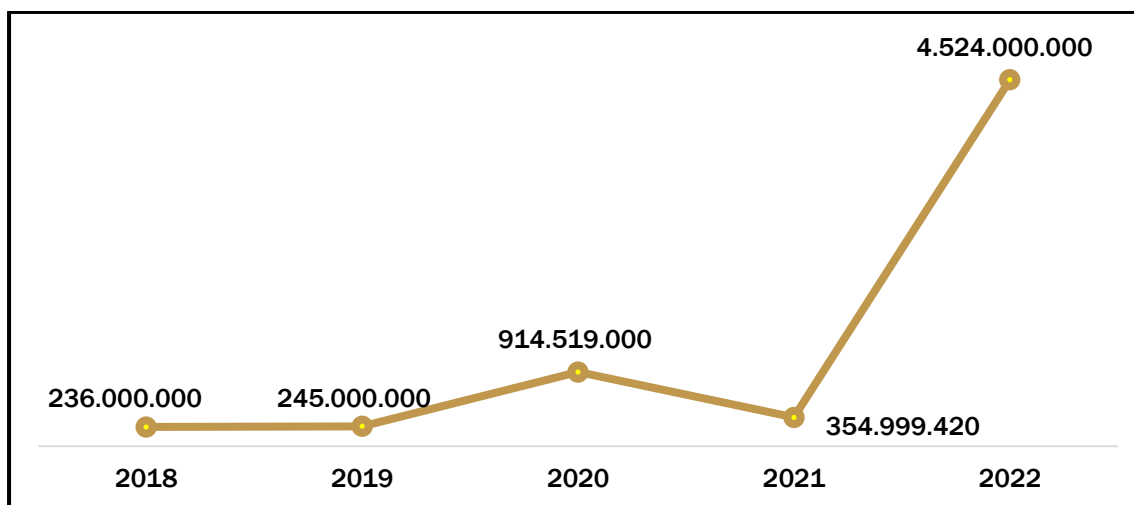
Penanggulangan kemiskinan melalui bidang ketenagakerjaan, Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang ada di Kabupaten Rote Ndao yang masih menganggur sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Selain itu juga lewat dana pemberdayaan yang ada, mereka harus diprioritaskan sehingga mereka menciptakan lapangan kerja bagi dirinya masing-masing dan memperoleh penghasilan untuk kesejahteraannya.

Pemerintah juga menyediakan lahan dan rumah bagi masyarakat miskin lewat program transmigrasi lokal, masyarakat diberdayakan untuk dapat mengolah lahan yang disediakan untuk kebutuhan pangannya dan lebihnya untuk dijual. Selanjutnya akan dilakukan pembinaan kepada masyarakat transmigrasi lokal agar dapat mandiri dan maju dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada.

Upaya Penanggulangan kemiskinan dibidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini menggunakan Anggaran sebagaimana Pada Gambar 3.19 berikut :

Gambar 3.19

Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2018-2022



Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

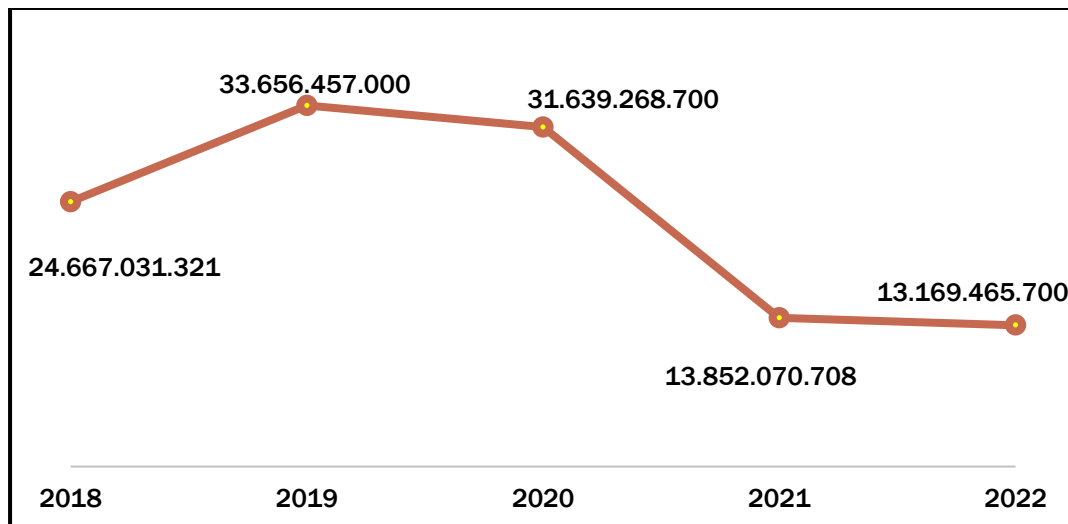
3.3.14 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar sedapat mungkin bisa menjaga sumber daya alam yang ada sehingga masyarakat miskin dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu target utama untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik. Dengan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang sehat juga memenuhi syarat keamanan bangunan. Alokasi Anggaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup seperti Pada Gambar 3.20 berikut:

Gambar 3.20
Alokasi APBD Kabupaten Rote Ndao Untuk
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2022

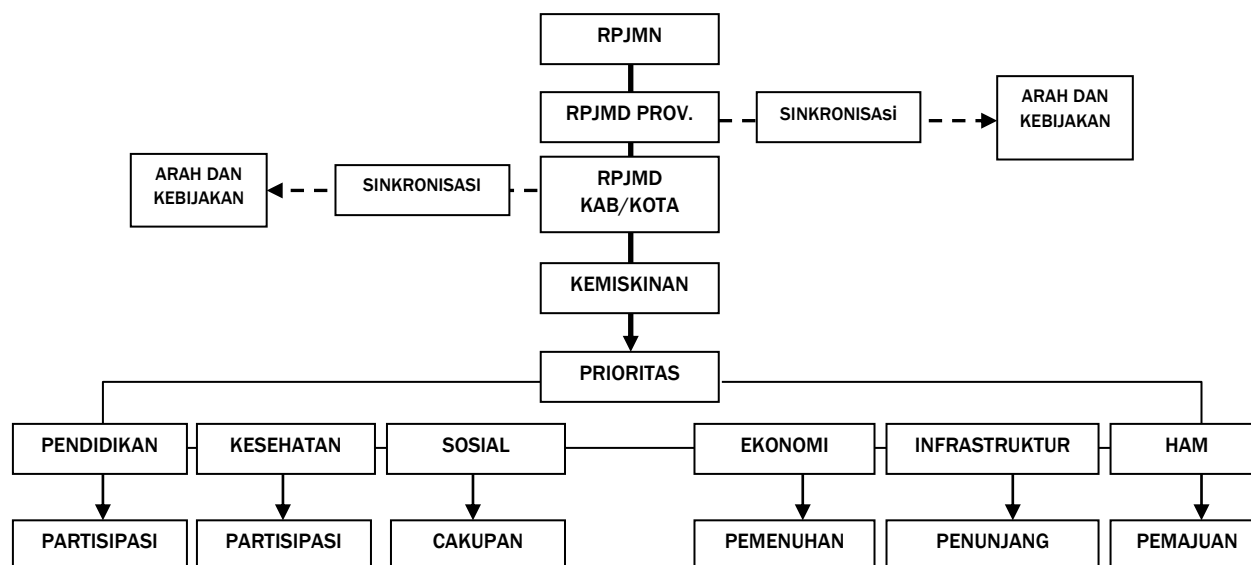


Sumber Data : BKA Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

3.4 Pengendalian dan Evaluasi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang sebelumnya disebut Bappeda sebagai sekretariat TKPKD pada prinsipnya, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 melakukan pengendalian dan evaluasi kemiskinan. Oleh karena itu, mekanisme pengendalian dan evaluasi perlu ditingkatkan pada penentuan prioritas utama yang dapat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sinergitas mekanisme koordinasi pengendalian, termasuk pemantauan prioritas penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan mutu dan relevansinya terhadap capaian program penanggulangan kemiskinan.

a. Mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana;



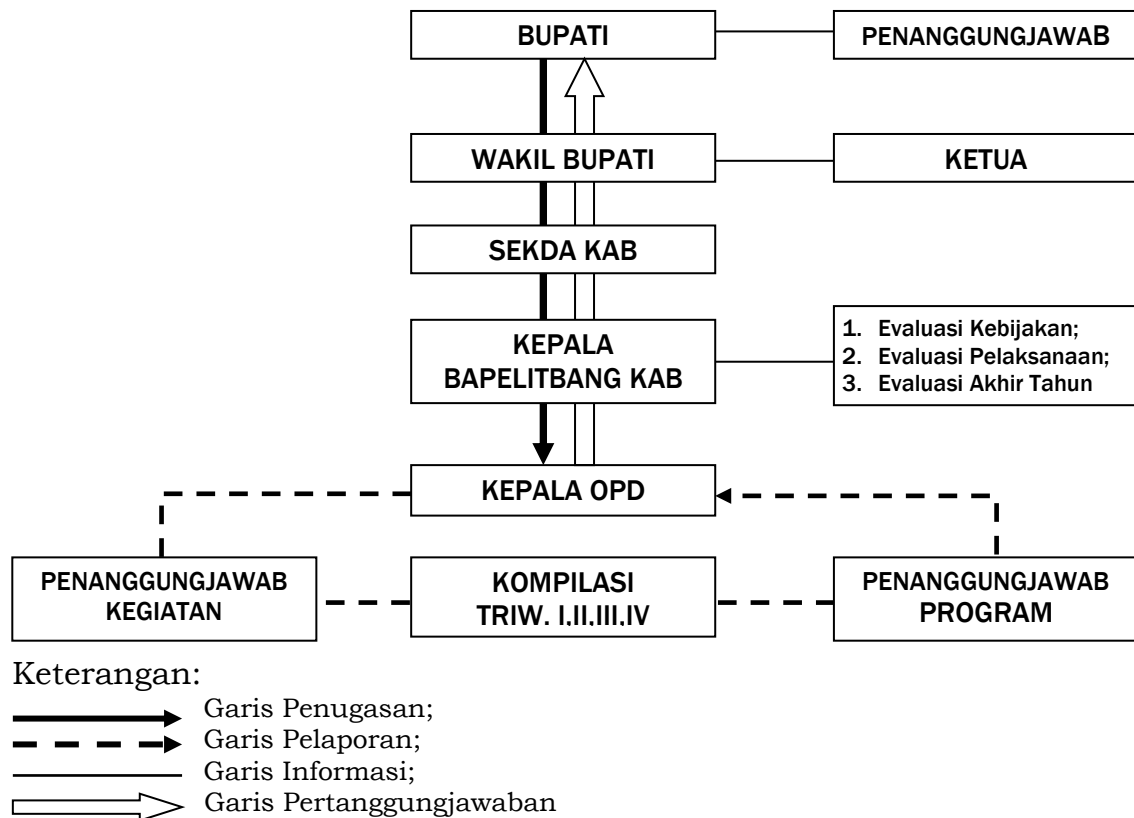
Keterangan:

—————> Garis koordinasi pengendalian

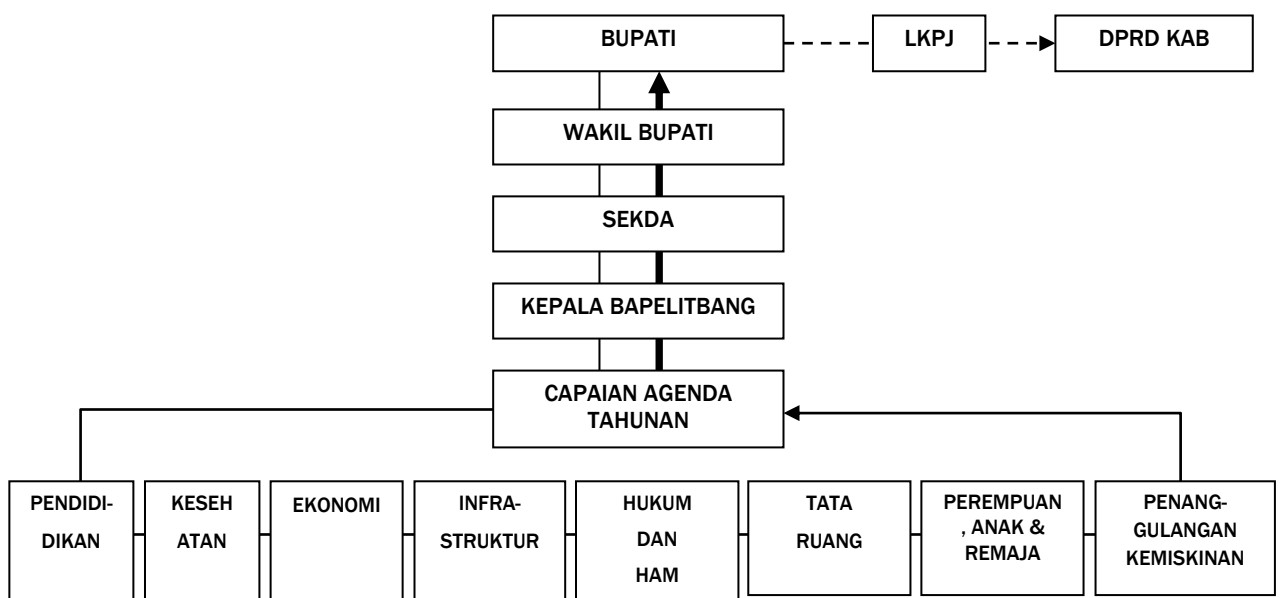
-----> Garis koordinasi sinkronisasi arah kebijakan

Koordinasi pengendalian bertujuan memantau pelaksanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sedangkan koordinasi sinkronisasi arah kebijakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

b. Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana



c. Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap akhir tahun rencana.



Keterangan:
 —————> Garis Penugasan;
 —————> Garis Pelaporan;
 - - - - -> Garis Pertanggungjawaban.

Berikut ini hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kinerja dan Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 3.3
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kinerja dan Anggaran OPD

NO	NAMA OPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN							
		2021				2022 (S.D. Triwulan III)			
		KINERJA		KEUANGAN		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
1	Dinas PKO	93,16	ST	91,32	ST	47,89	SR	56,09	R
2	Dinas Kesehatan	92,23	ST	93,25	ST	56,12	R	50,45	SR
3	Dinas PUPR	99,44	ST	97,37	ST	54,33	R	36,34	SR
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	99,77	ST	98,49	ST	77,49	T	74,12	S
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	94,20	ST	94,41	ST	56,73	R	49,91	SR
6	Dinas Kependudukan dan Capil	91,58	ST	93,98	ST	60,95	R	55,98	R
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	97,38	ST	97,45	ST	66,51	S	59,25	R
8	Dinas Sosial	92,36	ST	96,51	ST	78,95	T	69,79	S
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96,19	ST	95,75	ST	47,48	SR	50,06	SR
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	99,28	ST	92,63	ST	73,82	S	71,48	S
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	98,21	ST	93,62	ST	77,72	T	64,13	R

NO	NAMA OPD	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN							
		2021				2022 (S.D. Triwulan III)			
		KINERJA		KEUANGAN		KINERJA		KEUANGAN	
		%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT
12	Bagian Ekbang dan SDA	97,69	ST	96,38	ST	69,50	S	73,20	S
13	Dinas Perhubungan	91,18	ST	93,59	ST	77,34	T	61,62	R
14	Dinas Ketahanan Pangan	91,84	ST	91,98	ST	65,71	R	64,95	R
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95,30	ST	99,31	ST	67,81	S	71,52	S
16	Dinas Peternakan	94,72	ST	94,88	ST	69,50	S	74,20	S
17	Dinas Pertanian	92,80	ST	96,51	ST	57,40	R	60,41	R
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	93,33	ST	94,49	ST	83,02	T	68,69	S
19	Dinas Perikanan	99,60	ST	99,65	ST	59,37	R	48,76	SR
RATA – RATA		95,28	ST	95,34	ST	65,66	S	61,10	S

KETERANGAN:

ST = SANGAT TINGGI

T = TINGGI

R = RENDAH

SR = SANGAT RENDAH

Berdasarkan hasil Evaluasi di atas bahwa rata-rata kinerja OPD Pengelola Program Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 95,28% dengan predikat Sangat Tinggi dan realisasi anggaran sebesar 95,34 %. Hal ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit bagi upaya pengentasan kemiskinan dengan semakin banyak anggaran yang dikucurkan kepada masyarakat. Sedangkan pada Triwulan III Tahun 2022 realisasi kinerja 65,66%, realisasi keuangan sebesar 61,10% dan diharapkan akan mencapai di atas 90,00% pada akhir 2022 sehingga memberi dampak pada perekonomian Kabupaten Rote Ndao dan berimbas pada menurunnya angka kemiskinan.

BAB IV

CAPAIAN DAN ANALISIS

4.1 PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri RI Nomor 53 Tahun 2020 kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi dilakukan dengan cara pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Program sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- 1) Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- 2) Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- 3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Implementasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao yang tercantum dalam APBD Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2022

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
1.	Sosial Dan Ekonomi	
	Program : Program rehabilitasi sosial Kegiatan : 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial); 2) Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Dinas Sosial
	Program : Perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan : 1) Pemeliharaan Anak Terlantar; 2) Pengelola Data fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota.	Dinas Sosial
	Program : Penanganan bencana Kegiatan : 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	bidang Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten	
	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan : 1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perikanan
	Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : 1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Dinas Kebudayaan dan pariwisata
	Program : Pengembangan UMKM Kegiatan : 1) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, UKM Perindag
	Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan : 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Peternakan
	Program : Perizinan Usaha Pertanian Kegiatan : 1) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : 1) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota;	Dinas Peternakan

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	2) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Pendidikan	
	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 1) Administrasi Tata Pemerintahan.	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra
3.	Kesehatan	
	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Kesehatan
	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan :	Dinas Kesehatan

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota; 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	
4.	Ketenagakerjaan	
	Program : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan : 1) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan : 1) Kursus Bahas Inggris bagi sarjana	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra
	Program : Pengembangan Jasa Konstruksi Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
5.	Infrastruktur Dasar	
	Program : Penyelenggaraan Jalan Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum Kegiatan : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan : 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Kegiatan : 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Rote Ndao.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program : Pengembangan Perumahan Kegiatan : 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

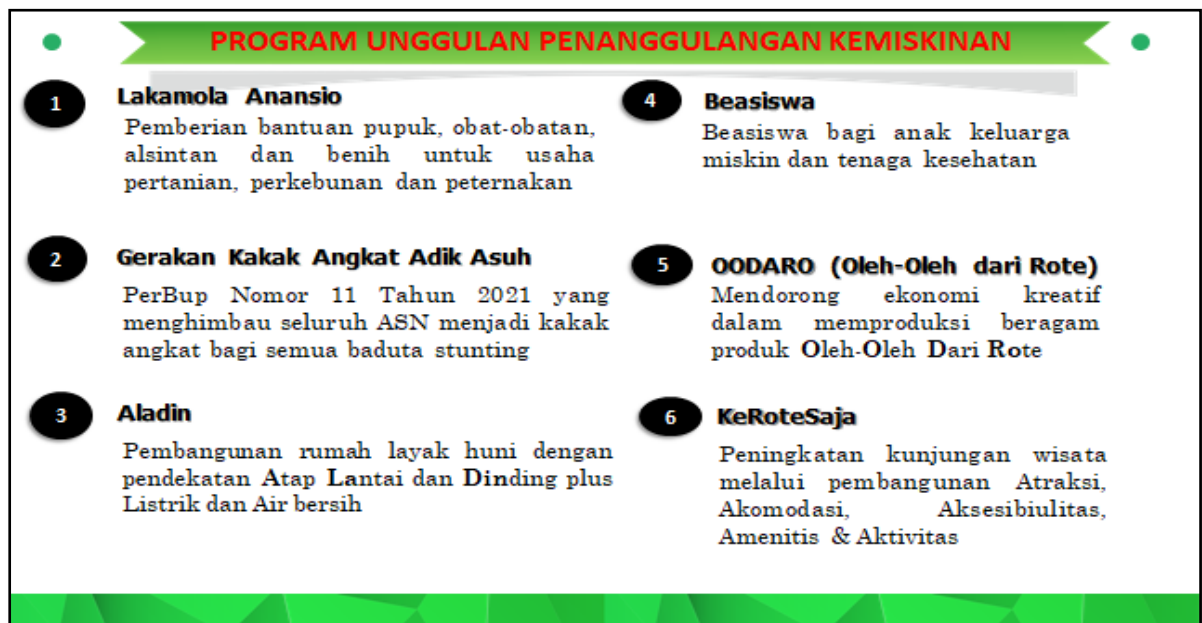
NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Hektar	
	Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kegiatan : 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 1) Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Lobalain, Kec. Rote Barat Laut, Kec. Rote Tengah, Kec. Pantai Baru, Kec. Rote Timur
6.	Ketahanan Pangan	
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian & Dinas Peternakan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian Kegiatan : 1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian & Dinas Peternakan
	Program : Penyuluhan Pertanian Kegiatan : 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan : 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perikanan

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan : 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.	Dinas Perikanan
	Program : Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan : 1) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi 2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program : Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kegiatan : 1) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perikanan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan : 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian & Dinas Peternakan
	Program : Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian Kegiatan : 1) Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian & Dinas Peternakan

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	2) Pembangunan Prasarana Pertanian	
	Program : Penyuluhan Pertanian Kegiatan : 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Dinas Pertanian
	Program : Pengelolaan Perikanan Tangkap Kegiatan : 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Perikanan
	Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan : 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;	Dinas Perikanan
7.	Penanggulangan Bencana	
	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : 1) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 2) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Pemberdayaan Keluarga, perlindungan perempuan dan anak	
	Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Peningkatan Kualitas	Dinas Pemberdayaan

NO	INTERVENSI PROGRAM & KEGIATAN	OPD PENYELENGGARA
	Keluarga Kegiatan : 1) Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kab/Kota.	Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Rote Ndao.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS) Kegiatan : 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 4.1
Program unggulan penanggulangan kemiskinan



4.2 CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

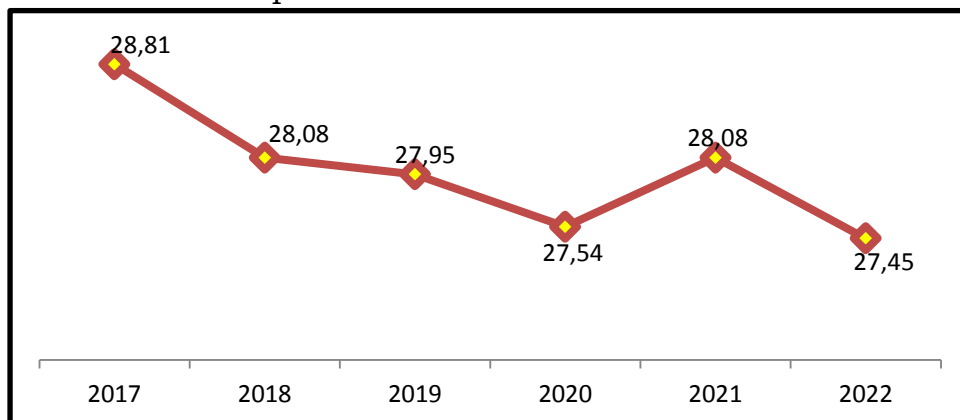
1. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan **di bawah garis kemiskinan**.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao terhitung sejak tahun 2017-2020 mengalami penurunan namun belum signifikan, tahun 2017 menurun sebesar 0,79 persen, tahun 2018 menurun sebesar 0,73 persen, tahun 2019 menurun sebesar 0,13 persen, dan tahun 2020 menurun sebesar 0,41 persen, namun tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,63 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah dan seluruh stakeholder melalui strategi intervensi program dan kegiatan yang terintegrasi sesuai dengan lokus penerima manfaat masyarakat miskin *by name by address*. Adapun perkembangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.2, 4.3 dan 4.4 berikut:

Gambar 4.2

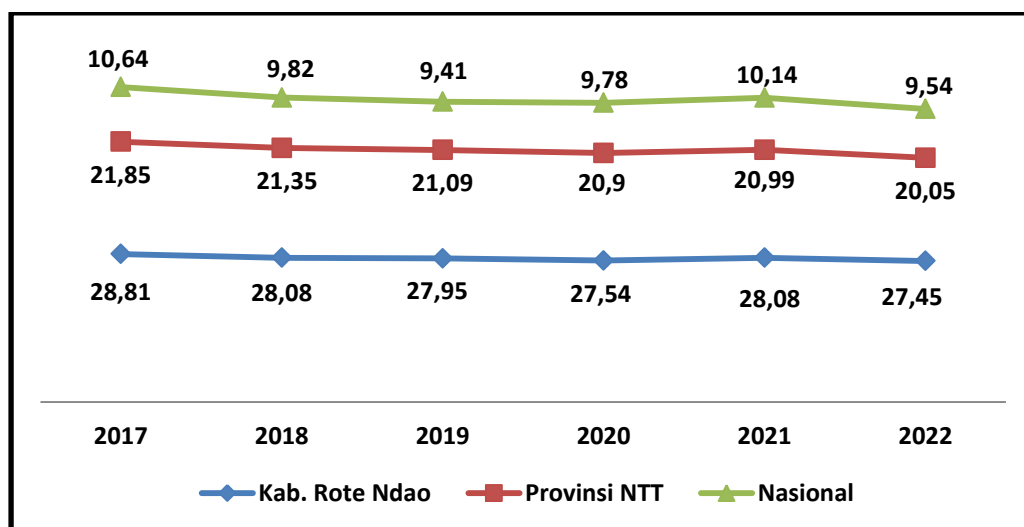
Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022

Gambar 4.3

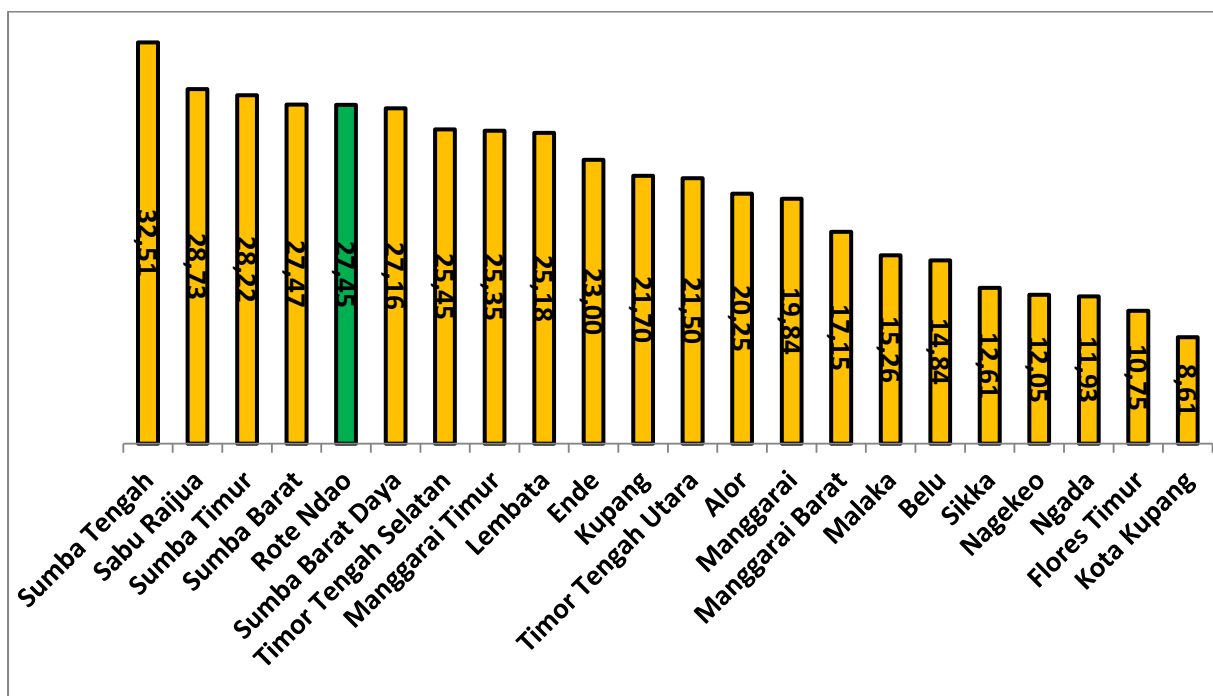
Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Gambar 4.4

Perbandingan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten/Kota lainnya di NTT Tahun 2022:



Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022)

Berdasarkan data pada gambar 4.4 Perbandingan penduduk miskin Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten/Kota lainnya di NTT pada Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Rote Ndao persentase penduduk miskin berada pada urutan ke-5 (lima), masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Oleh karena itu dibutuhkan intensitas kerja yang seirus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao bekerjasama dengan semua *stakeholder* yang berkepentingan untuk dapat menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi program dan kegiatan yang tepat sasaran baik lokasi maupun penerima program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga disparitas kemiskinan yang terjadi bisa minimalisir.

Provinsi NTT merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan yang kompleks terkait kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan, masih tingginya angka kemiskinan di setiap Kabupaten/kota di Provinsi NTT, menyebabkan secara akumulatif Provinsi ini berada pada posisi terbawah tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Kondisi alam di Provinsi NTT tandus dan gersang, kekeringan, rawan pangan menjadi permasalahan rutin warga NTT. Kemiskinan, kasus stunting, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan kemiskinan. Provinsi NTT memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial dan beragam, namun sampai saat ini belum dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat agar lebih sejahtera, adil dan merata. Oleh karena itu langkah-langkah strategis ini harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien yaitu dengan memberikan akses investasi yang lebih mudah namun memperhatikan rambu-rambu atau koridor hukum yang berlaku sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada masyarakat, lingkungan atau negara sebagai institusi formal. Melalui penerapan kebijakan Otonomi Daerah yang tertuang secara jelas dalam peraturan Perundang-Undangan memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di masing-masing Daerah sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

banyak. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, lokasi yang tepat sasaran, rumah tangga yang miskin secara mendetail dan formula yang cocok untuk penanggulangan kemiskinan tersebut.

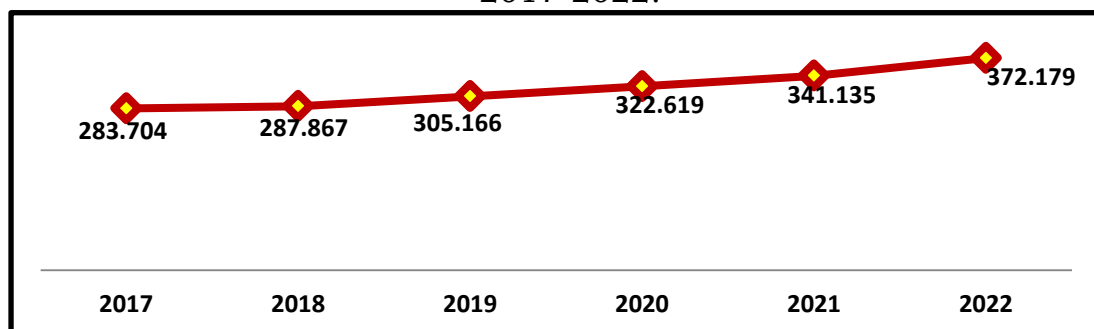
2. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berikut Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.5

Gambar 4.5

Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022:

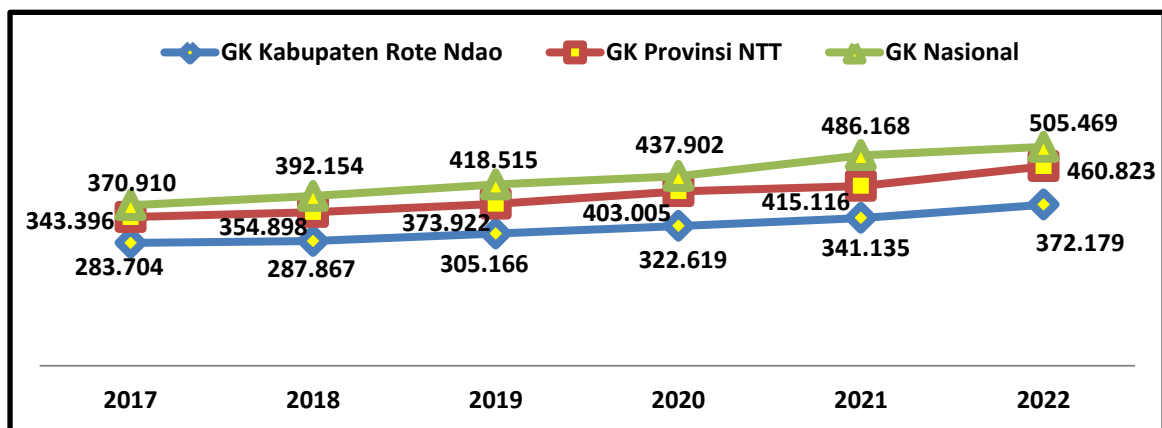


Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Garis Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2017 sebesar Rp. 283.704, terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar Rp. 372.179 atau meningkat sebesar Rp. 88.475 selama 6 tahun.

Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi dan Nasional pada tahun 2017-2022 :

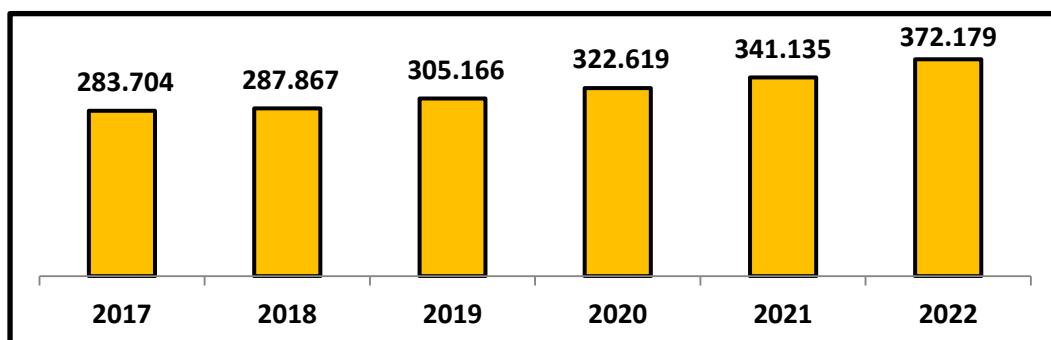
Gambar 4.6 Relevansi Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional nilainya berbeda karena mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperoleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kabupaten Rote Ndao berada di bawah garis kemiskinan Provinsi dan Nasional

Gambar 4.7 Efektivitas Garis Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

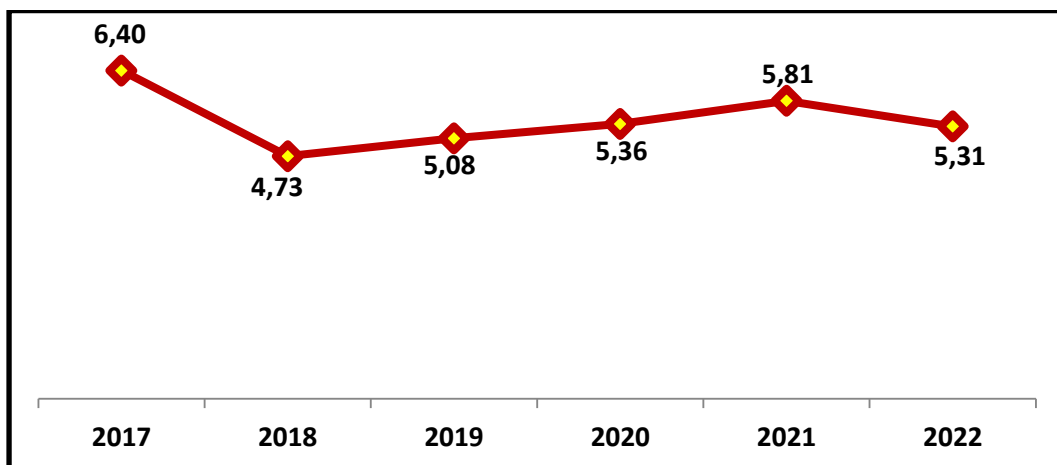
Perkembangan Garis Kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, oleh karena itu perlu ada integrasi program/kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

3. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Berikut Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.8 :

Gambar 4.8
Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022

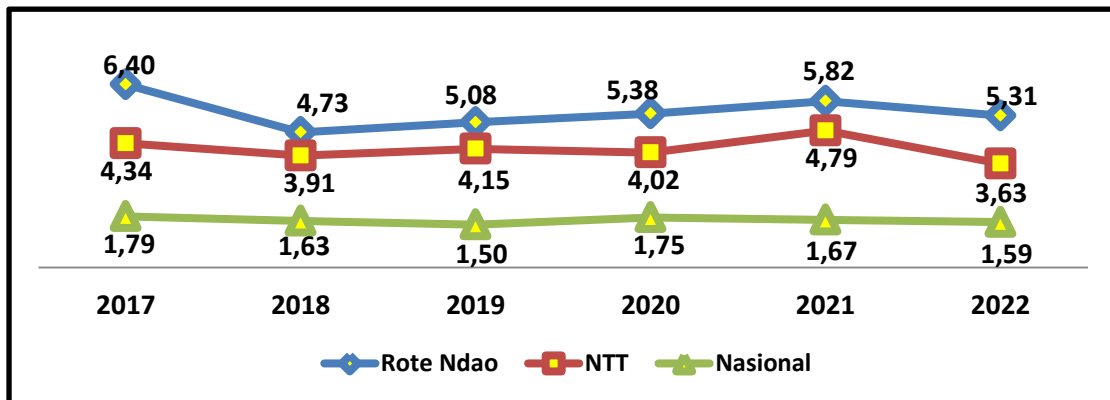


Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi sejak tahun 2017 sebesar 6,40 persen, mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 4,73 persen kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 sebesar 5,82 persen dan pada tahun 2022 menurun 5,31 persen.

Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut :

Gambar 4.9
 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
 Tahun 2017-2022

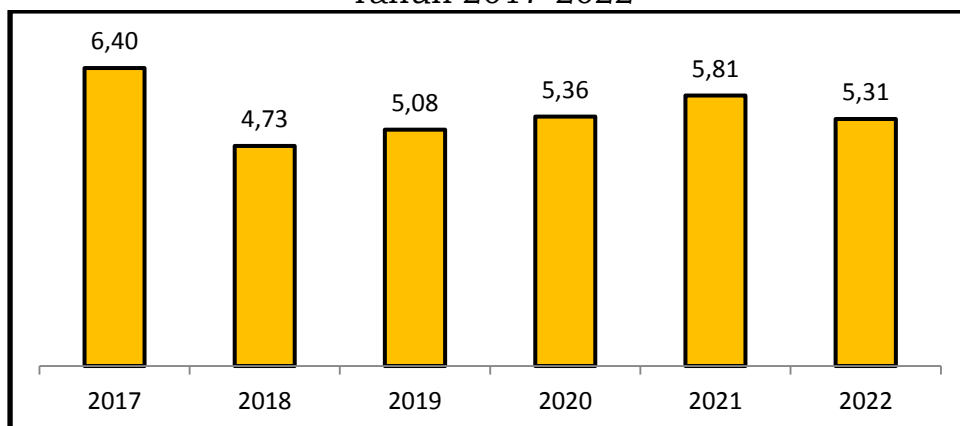


Sumber Data : BPS Kab.Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada gambar 4.9 di atas menunjukkan relevansi pola perubahan dari tahun ke tahun dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional. Pola perubahan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2017-2022, namun pola perubahannya sama sehingga indeks kedalaman ketiga capaian tersebut menunjukkan pola perubahan yang relevan antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional.

Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.10:

Gambar 4.10
 Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
 Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

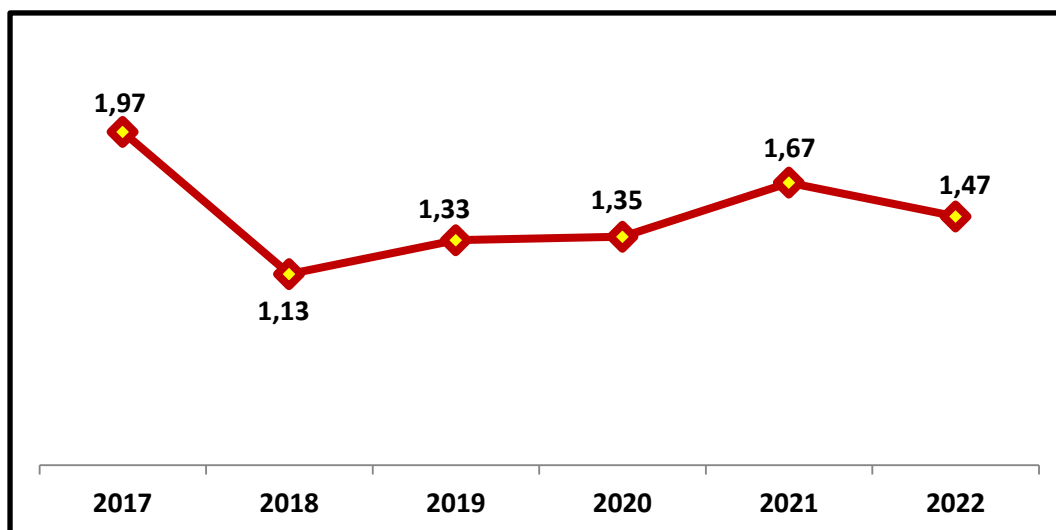
Pada gambar 4.10 di atas menunjukkan perubahan indeks kedalaman kemiskinan yang cenderung fluktuatif, hal ini menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dalam upaya menurunkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga disimpulkan program-program penanggulangan kemiskinan belum efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berikut Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.11:

Gambar 4.11
Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Rote Ndao tahun 2017-2022



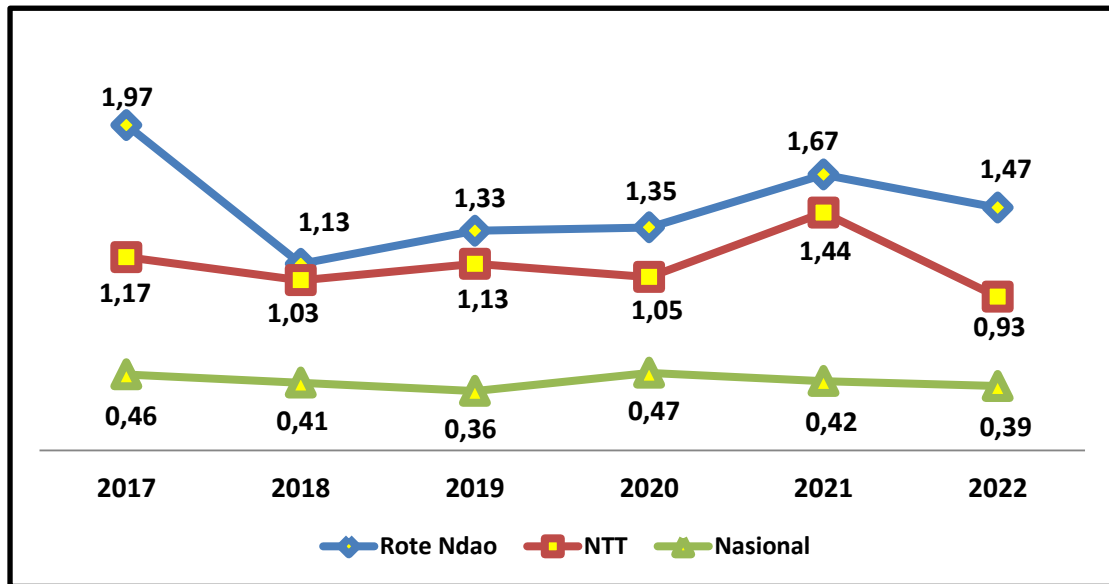
Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 sebesar 0,84 persen, kemudian dari tahun 2018

meningkat lagi hingga tahun 2021 sebesar 0,54 persen dan pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 0.2 persen.

Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut:

Gambar 4.12
Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022

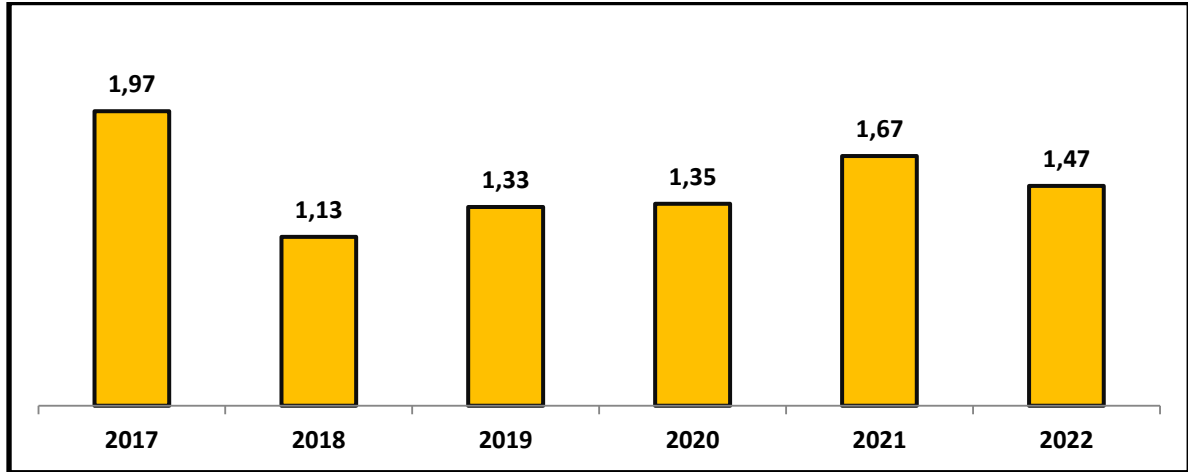


Sumber : BPS Tahun 2018-2021 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

Pada gambar 4.12 di atas menunjukkan perbedaan pola perubahan dari tahun ke tahun dengan capaian Provinsi NTT dan Nasional. Pola perubahan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan trend yang fluktuatif dari tahun 2017-2022, pola perubahannya tidak sama, sehingga indeks kedalaman ketiga capaian tersebut menunjukkan pola perubahan yang tidak relevan antara Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional.

Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 4.13:

Gambar 4.13
Efektivitas Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2017-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018-2022 & Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022

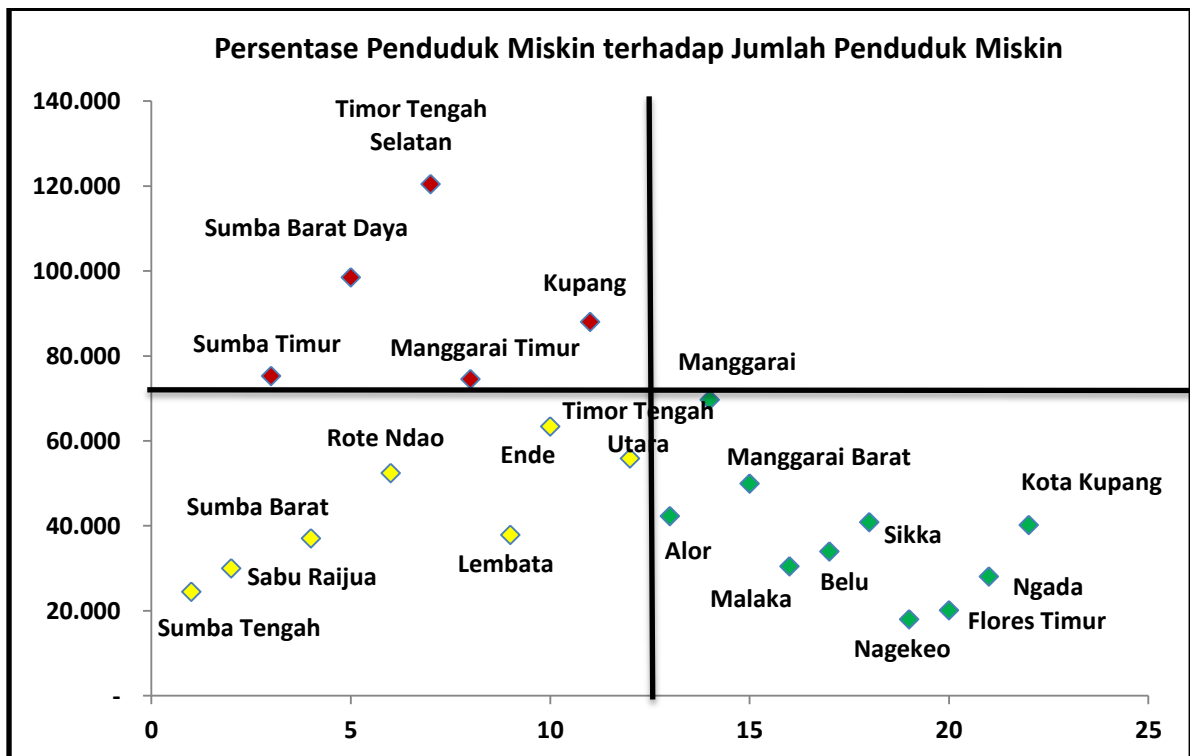
Gambar 4.13 di atas menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan cenderung mengalami penurunan namun fluktuatif, hal ini dibarengi dengan pandemi covid-19 yang melanda dunia dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan pasokan bahan pangan dunia mengalami kelangkaan sehingga terjadi inflasi, Kabupaten Rote Ndao juga mengalami efek ketidakstabilan yang melanda dunia saat ini. Hal lain juga dapat dijelaskan bahwa bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dalam upaya menurunkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga disimpulkan program-program penanggulangan kemiskinan belum efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

Untuk melihat lebih jauh lagi kondisi kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao masih bisa dilakukan analisis lebih lanjut. Analisis selanjutnya adalah analisis Prioritas Wilayah, analisis ini bisa memperlihatkan posisi Kabupaten Rote Ndao dalam kuadran prioritas wilayah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Titik berwarna merah

menunjukkan posisi wilayah Prioritas 1, titik berwarna kuning menunjukkan posisi wilayah Prioritas 2, titik berwarna hijau menunjukkan posisi wilayah prioritas 3, Selanjutnya dapat dilihat dalam gambar 4.14 sampai 4.15 di bawah ini.

Gambar 4.14

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

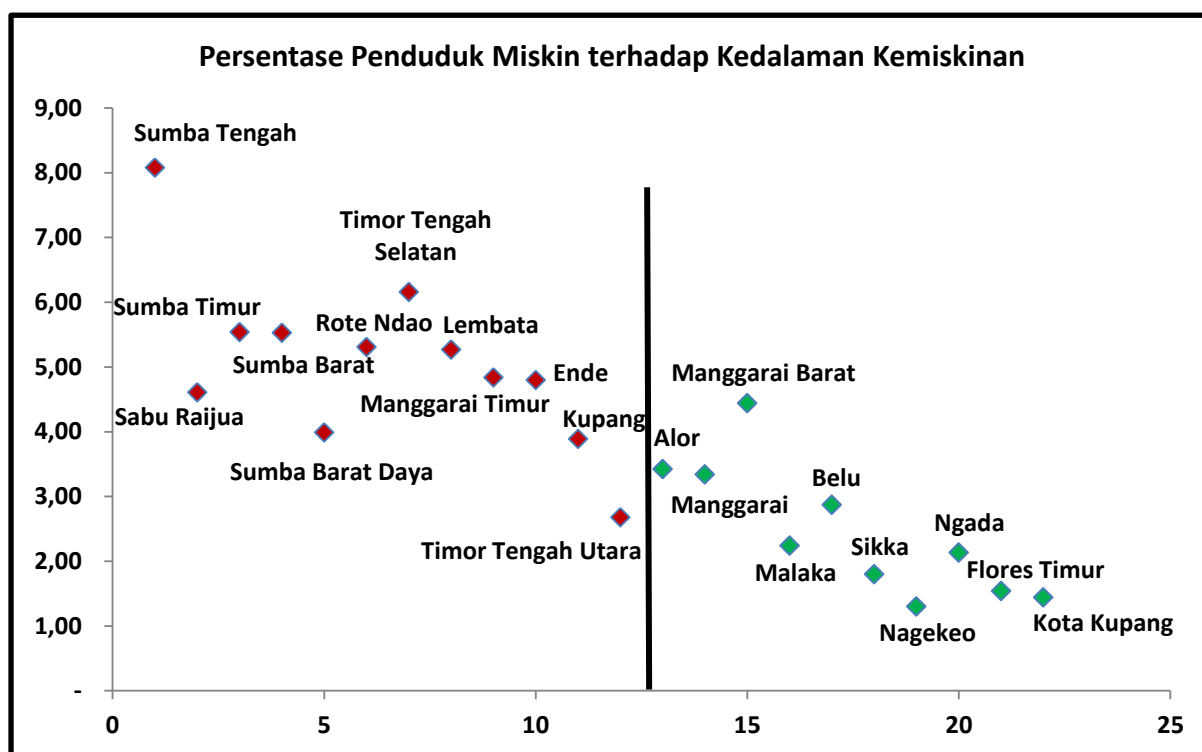


Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022)

Pada gambar 4.14 di atas dijabarkan Kabupaten Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan persentase penduduk miskin 27,45 atau berjumlah 52.430 jiwa miskin, hal ini berarti capaian tersebut **Sudah Cukup Baik** jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 4.15

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

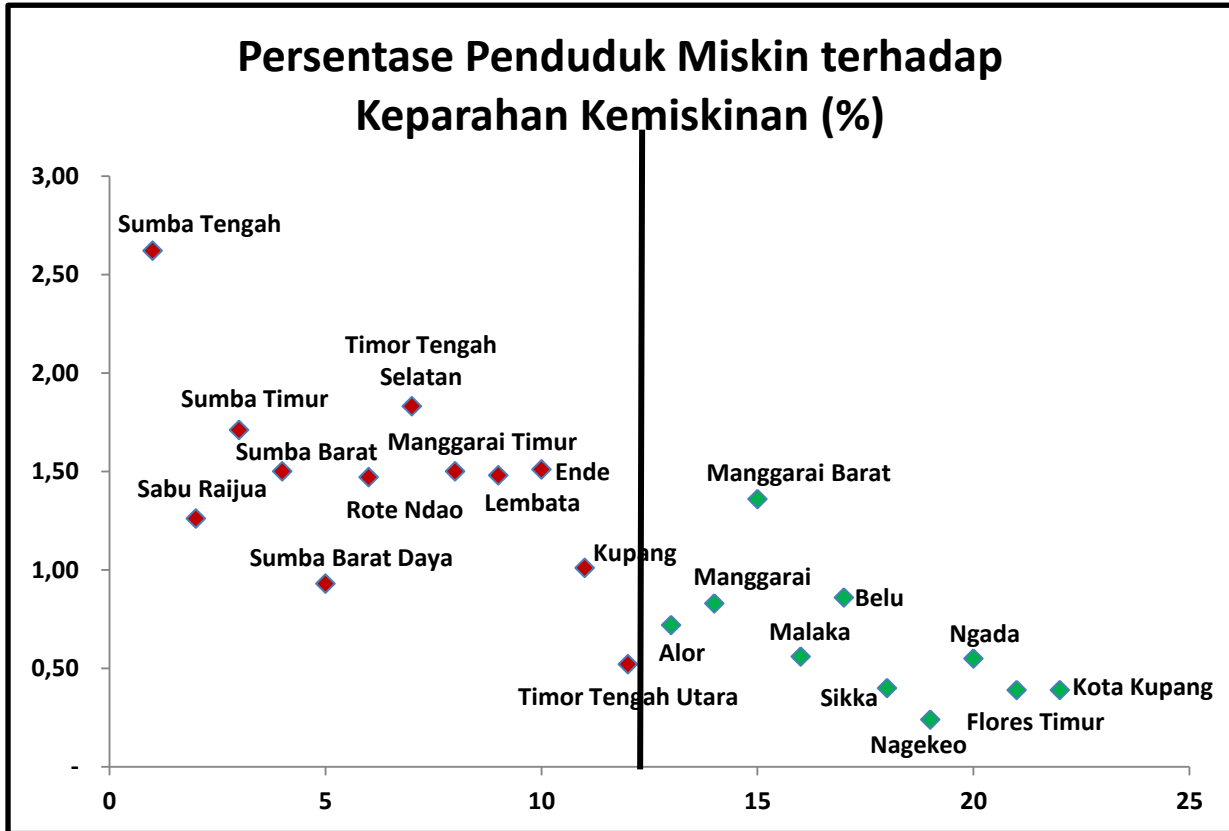


Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022).

Pada gambar 4.15 di atas dapat dijabarkan Kabupaten Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan indeks kedalaman kemiskinan 5,31 persen pada tahun 2022, hal ini berarti capaian tersebut **Perlu Ada Upaya Yang Intensif** jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 4.16

Analisis Prioritas Wilayah Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 :



Sumber : BPS (Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022).

Pada gambar 4.16 di atas dapat dijabarkan Rote Ndao berada pada prioritas kedua dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,47 persen pada tahun 2020, hal ini berarti capaian tersebut **Perlu Ada Upaya Yang Intensif** jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Permasalahan Dalam Pembangunan

Rencana tindak lanjut program penanggulangan kemiskinan dimaksud untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan program kegiatan seluruh Perangkat Daerah sehingga anggaran yang dialokasikan bisa tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat.

5.1.1 Permasalahan Pembangunan Kependudukan

Permasalahan kependudukan masih diperhadapkan dengan pengendalian penduduk yang belum optimal. Permasalahannya terletak pada:

1. Tatakelola pembangunan kependudukan yang belum berkembang optimal;
2. Pengendalian penduduk yang belum terintegrasi secara baik;
3. Pencatatan/registrasi penduduk;
4. Kualitas SDM pelayanan pencatatan sipil;
5. Cakupan pemilikan akta dan perubahan kualitas data untuk pengendalian kependudukan;
6. Jangkauan pelayanan dan penyuluhan KB yang belum optimal;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
8. Belum adanya SOP dibidang pendaftaran penduduk;
9. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk karena ada persepsi masyarakat bila memiliki banyak anak akan memperoleh bantuan sosial yang semakin banyak.

5.1.2 Permasalahan Pembangunan Ketenagakerjaan

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
2. Masih rendahnya pembukaan lapangan kerja baru;
3. Bursa Tenaga Kerja masih didominasi dari sektor Primer;
4. Pelatihan ketenagakerjaan yang belum menjangkau pada semua lapangan usaha;

5. Tenaga kerja yang telah dilatih belum mampu berdaya saing dan sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan;
6. Keterbatasan infrastruktur untuk pelatihan keahlian tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK) serta pembinaan yang belum tepat dan berkelanjutan;
7. Keterbatasan modal usaha kecil dan menengah yang belum menjangkau pada semua lapangan usaha kecil dan menengah;
8. Belum adanya jaminan bagi usaha kecil dan menengah dalam pemasaran dan perdagangan.

5.1.3. Permasalahan Pembangunan Pendidikan

Pemerataan pembangunan pendidikan

1. Masalah aksesibilitas/cakupan pelayanan pendidikan yang belum merata dan terjangkau pada seluruh wilayah;
2. Masih terdapat 6,84% penduduk yang buta huruf;
3. Kurangnya penguasaan teknologi informasi;
4. Masih banyak guru yang belum memahami hakekat dari penerapan kurikulum 2013;
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan;
6. Penyiapan, rekrutmen dan pengangkatan, penempatan dan penugasan serta pembinaan dan pengembangan guru.

Pada prinsipnya guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dalam perkembangannya, fungsi, peran, dan kedudukan guru terkendala oleh berbagai hal, antara lain distribusi guru yang tidak merata, pengangkatan/penempatan yang bercorak primordial, mobilitas guru yang sangat terbatas di lingkup daerah tertentu, peningkatan profesional guru terhambat serta terpengaruh pada keadaan tertentu.

1. Penyiapan Guru

- a) Kualitas layanan pendidikan yang beragam dan belum memenuhi standar lembaga pendidikan guru profesional yang berdampak pada rendahnya mutu pendidikan;

- b) Penyelenggaraan pendidikan guru belum dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru sehingga mengakibatkan kelebihan untuk guru bidang tertentu tetapi kekurangan untuk bidang studi lainnya.
2. Rekrutmen Guru
 - a) Sistem rekrutmen guru belum berbasis kebutuhan lapangan, berlebih di kota dan kekurangan di pedesaan;
 - b) Banyak guru yang diangkat tidak sesuai dengan persyaratan standar minimal kompetensi guru;
 - c) Rekrutmen guru honorer di sekolah negeri masih dominan dan menimbulkan banyak masalah meskipun ada larangan untuk merekrut guru honor.
 3. Penempatan dan Penugasan Guru
 - a) Distribusi guru yang tidak merata terutama guru mata pelajaran, terkonsentrasi di kota sehingga kewajiban jam mengajar guru minimal 24 jam tidak dapat dipenuhi;
 - b) Karena terbatasnya guru di daerah pedesaan dan terpencil, masyarakat terpaksa merekrut guru yang tidak memenuhi kualifikasi standar nasional;
 4. Pembinaan dan Pengembangan Guru
 - a) Pembinaan karir guru tidak jelas, belum terpadu antara kebijakan pusat dan daerah serta tidak dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - b) Mutasi guru masih dominan akibat ketatnya sistem penganggaran dalam APBD;
 - c) Terbatasnya kuota sertifikasi guru.

5.1.4. Permasalahan Pembangunan Kesehatan

Pemerataan pembangunan kesehatan;

1. Masalah aksesibilitas/cakupan pelayanan kesehatan yang belum merata dan terjangkau pada seluruh wilayah;
2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Masih tingginya prevalensi stunting;
4. Rendahnya status gizi ibu hamil;

5. Kurangnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan tenaga medis;
6. Terbatasnya fasilitas pelayanan di Pustu;
7. Masih terbatasnya pengetahuan kader posyandu, lemahnya koordinasi antara kader posyandu dan masyarakat;
8. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kesehatan;
9. Infrastruktur pendukung pembangunan jalan/jembatan yang belum dapat dilalui kendaraan;
10. Transportasi baik darat dan laut yang belum mampu mengkomodir pelayanan kesehatan;
11. Penyiapan, rekrutmen dan pengangkatan, penempatan dan penugasan serta pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan terlatih yang belum tersebar dan belum optimal dilaksanakan.

5.1.5 Permasalahan Pembangunan Ekonomi (Usaha Kecil dan Menengah)

1. Belum semua tenaga kerja mendapatkan pelayanan pelatihan keterampilan usaha kecil dan menengah;
2. Belum semua usaha kecil dan menengah tersentuh permodalan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha;
3. Belum semua usaha kecil dan menengah mendapatkan bantuan peralatan pendukung;
4. Kurang fasilitasi ijin usaha bagi usaha kecil dan menengah;
5. Pembinaan yang belum tepat dan berkesinambungan;
6. Belum ada jaminan yang pasti bagi usaha kecil dan menengah dalam produksi, pemasaran dan perdagangan;
7. Masih banyak Koperasi yang tidak aktif;
8. Masih rendahnya investasi dan penanaman modal di daerah;
9. Belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif.

5.1.6. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Perumahan Warga

Miskin

1. Penataan pendataan infrastruktur permukiman warga miskin yang belum optimal dan terintegrasi secara baik;

2. Perbaiki rumah layak huni yang belum menjangkau semua perumahan warga miskin;
3. Belum dikembangkan *grand design* kredit rumah murah;
4. Rendahnya ketersediaan fasilitas pendukung untuk perumahan seperti listrik, air bersih dan sanitasi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah (PD)

Tabel 5.1 Rencana Tindak Lanjut Perangkat Daerah

No	Uraian Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Perangkat Daerah (PD)
1.	Rendahnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kependidikan dan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah	Dinas PKO
		2. Penduduk usia sekolah bersekolah pada semua jenjang pendidikan sesuai usianya	
2.	Rendahnya Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Kesbangpol, Dinas Sosial, BPBD, Dinas PMD, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag, Dinas PUPR, Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan,
		2. Kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan penanggulangan stunting	
		3. Meningkatkan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok	
		4. Meningkatkan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan	
		5. Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat	
		6. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan setiap puskesmas	

No	Uraian Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Perangkat Daerah (PD)
		7. Penguatan kapasitas institusi kesehatan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas	Dinas Kominfo
		8. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif	
3.	Masih Minimnya Alokasi Anggaran untuk Program yang Berkontribusi Langsung ke Penerima Manfaat.	1. Mengoptimalkan peningkatan jumlah penerima manfaat 3 Program Unggulan \. Merumuskan program perlindungan sosial yang sasaran penerima manfaat programnya telah melalui proses verifikasi dan validasi.	Dinas Sosial, Bapelitbang, BKA
3.	Rendahnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dinas P3AP2KB
4.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk yang meningkat	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB	Dinas P3AP2KB
		2. Menjaga pertumbuhan penduduk dibawah 3.80%	
5.	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja berbasis teknologi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2. Adanya lembaga penanganan trafficking	
6.	Rendahnya peran Koperasi UMKM, industri dan perdagangan	1. Meningkatkan sistim dan jaringan distribusi, pengawasan barang dan pengembangan pasar	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas PKPLH,
		2. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri rumah tangga	

No	Uraian Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Perangkat Daerah (PD)
		3. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi	Dinas Kominfo
		3. Pemberdayaan BUMDes	
		4. Kemudahan akses permodalan	
		5. Memperkuat infrastruktur dasar dan ekonomi kawasan perdesaan	
7.	Produksi pertanian, perkebunan dan perikanan belum maksimal	1. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan
		2. Pemanfaatan IPTEK	
		3. Meningkatkan pembibitan dan pengembangan serta pakan ternak	
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan	
8.	Ketahanan pangan	1. Memperkuat cadangan pangan masyarakat dengan membangun lumbung pangan di pedesaan	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan
		2. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi	
9.	Konektivitas	1. Pembangunan prasarana penghubung antar wilayah potensial	Dinas PUPR
		2. Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan	
10.	Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Air	1. Pembangunan dan pemeliharaan embung dan jaringan irigasi	Dinas PUPR, Dinas Pertanian
11.	Kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi layak	Dinas PKPLH, Dinas PUPR

No	Uraian Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut		Perangkat Daerah (PD)
12.	Dampak lingkungan	1.	Peningkatan pengelolaan sampah	Dinas PKPLH
		2.	Peningkatan Rehabilitasi Lahan Kritis	
13.	Bencana	1.	Meningkatkan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD
		2.	Integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan	
		3.	Meningkatkan SDM dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	
14	Transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	1.	Meningkatkan perencanaan yang transparan berbasis <i>e-planning</i>	Bapelitbang, Dinas PMD, BKA
		2.	Penataan kelembagaan desa	

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan.

- A. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara multi sektoral (pemerintah dan non pemerintah) untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II dan Dana Desa serta pendanaan lain yang tercermin lewat pencapaian kinerja daerah sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil analisa penanggulangan kemiskinan (pencapaian target indikator) untuk data/informasi tahun 2022 sesuai dengan target Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :
 - a) Persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,63 persen, dari 28,08 persen pada tahun 2021 menjadi 27,45 persen pada tahun 2022.
 - b) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 5,08 poin di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin menjadi sebesar 5,36 poin pada tahun 2022.
 - c) Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 1,67 poin di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,2 Poin menjadi 1,47 poin pada tahun 2022.
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu :
1. Perkonomian Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan sebesar 1,8 persen dari 0,21 persen tahun 2020 menjadi 2,01 persen pada tahun 2021. Hal ini tentunya berkorelasi dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada sektor primer dan sektor tersier yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Adapun sektor primer yang mengalami

peningkatan adalah sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor tersier yang mengalami peningkatan adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate.

2. Pandemi Covid-19 yang sudah mengalami penurunan menyebabkan kebijakan pemerintah terhadap *lockdown* dan *social distancing* menjadi lebih lunak sehingga produksi dan pemasaran produk-produk unggulan baik domestik maupun ekspor terus mengalami peningkatan. Akibat positif lainnya yaitu perilaku masyarakat dalam berbagai aktivitas, seperti kumpul-kumpul, pesta dan jalan-jalan mulai berjalan secara normal sehingga bisa meningkatkan jasa persewaan gedung, pesanan catering, percetakan dan transportasi.
3. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah terus meningkatkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin penerima manfaat melalui Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.288.700.000, dan alokasi dari APBD II Provinsi NTT sebesar Rp. 856.800.000 yang diberikan pada bulan Oktober-Desember tahun 2021.
4. Manajemen data *by name by address* penduduk miskin menjadi acuan bagi perangkat daerah dan lembaga lainnya (non pemerintah) dalam memberikan bantuan sarana prasarana dan stimulan keuangan, sehingga lebih tepat sasaran.

6.2 Rekomendasi

Perlu adanya implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang fokus sarannya pada:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui:
 - a) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;

- b) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Beras;
 - c) Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
 - d) Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).
2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui:
- a) Peningkatan Pendapatan/Akses pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti Kartu Prakerja, program vokasi;
 - c) Peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha
3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan, melalui:
- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak;
 - b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
4. Sektor-sektor prioritas yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu pertanian, peternakan dan perikanan, oleh karena itu sektor tersebut perlu mendapat porsi anggaran yang besar untuk pengadaan sarana prasarana pertanian dan perkebunan, sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap, pengadaan bibit ternak besar,

sedang maupun kecil. Kedepannya pemerintah akan membuka lahan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu sebagai *pilot project*.